

SKRIPSI

**MENAKAR PELUANG DESA NEPO KABUPATEN BARRU
SEBAGAI DESTINASI WISATA SYARIAH**



OLEH

**UMI KALSUM H
19.93202.040**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**MENAKAR PELUANG DESA NEPO KABUPATEN BARRU
SEBAGAI DESTINASI WISATA SYARIAH**



OLEH:

**UMI KALSUM H
NIM: 19.93202.040**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.E.) pada
Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**MENAKAR PELUANG DESA NEPO KABUPATEN BARRU
SEBAGAI DESTINASI WISATA SYARIAH**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Program Studi
Pariwisata Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**UMI KALSUM H
NIM: 19.93202.040**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PARIWISATA SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten barru
Sebagai Destinasi Wisata Syariah

Nama Mahasiswa : Umi Kalsum H

Nomor Induk Mahasiswa : 19.93202.040

Program Studi : Pariwisata Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : No. B 166/3/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Bahtiar, S.Ag., M.A. (.....)

NIP : 19720505 1998803 1 004

Pembimbing Pendamping : Sulkarnain, M.Si. (.....)

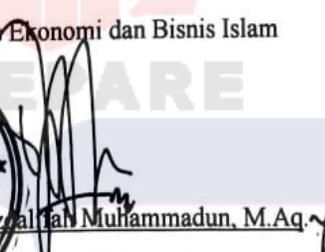
NIDN : 19880510 201903 1 005

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Muzalim Muhammadun, M.Aq.
19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru
Sebagai Destinasi Wisata Syariah
Nama Mahasiswa : Umi Kalsum H
Nomor Induk Mahasiswa : 19.93202.040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Pariwisata Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B 1663/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Bahtiar, S.Ag., M.A.	(Ketua)	(.....)
Sulkarnain, M.Si.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Arqam, M.Pd.	(Anggota)	(.....)
An Ras Try Astuti, M.E.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui,

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Huzdaniyah Muhammadun, M.Ag.
19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufiknya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu Nagasia dan Ayah saya Hasanuddin Sennong, yang telah banyak membantu saya dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Bahtiar S.Ag., M.Adan Bapak Sulkarnain, M.Si. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Mustika Syarifuddin, M.Sn, selaku penanggung jawab program studi pariwisata syariah atas semua ilmu dan motivasi yang telah diberikan.
4. Bapak Darwis, S.E., M.Si. selaku penasehat akademik yang telah mengarahkan saya, memberikan berbagai nasehat, motivasi, dukungan dan bantuannya dalam menjalani aktivitas akademik.
5. Bapak dan Ibu dosen fakultas ekonomi dan bisnis Islam dan juga para staff yang selama ini telah memberikan berbagai ilmu dan kemudahan dalam dunia akademik maupun non akademik.

6. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Pemerintah Kabupaten Barru beserta staf yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
8. Saudaraku tercinta Asriadi, Suryani Darwis, Lili Sulastri dan Zahra Salsabila atas doa dan semangat yang telah diberikan kepada penulis didalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan pada jurusan Pariwisata Syariah angkatan 19, Sahabat cebol squad yang sudah saya anggap sebagai saudara saya Hasrina, Haswindah, Misni, Wahyuni Sudirman, Suci Anita, Haerini Cahyani, Ismail, sahabat seperjuangan Adi Masse, Nusriana Nur'eni dan Dayat yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Keluarga, senior-senior, sahabat, teman-teman KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 12 Januari 2023

Penulis

Umi Kalsum H

Nim. 19.93202.040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Umi Kalsum H

NIM : 19.93202.040

Tempat/Tgl. Lahir : Lanrae, 16 Juni 2001

Program Studi : Pariwisata Syariah

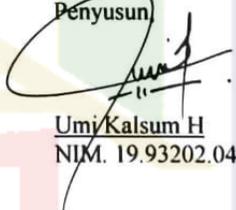
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru Sebagai
Desatinasi Wisata Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 12 Januari 2023

Penyusun


Umi Kalsum H

NIM. 19.93202.040

PAREPARE

ABSTRAK

Umi Kalsum H, *Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru Sebagai Destinasi Wisata Syariah*(dibimbing oleh Bapak Bahtiar dan Bapak Sulkarnain).

Penelitian ini membahas tentang Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru Sebagai destinasi wisata syariah tujuan penelitian ini (1). Untuk mengetahui peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah pada aspek atraksi (2). Untuk mengetahui peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah pada aspek akomodasi (3). Untuk mengetahui peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah pada aspek aksesibilitas.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu penelitian lapangan, jenis data primer dan sekunder yang diperoleh oleh observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yaitu teknik observasi, teknik wawancara (interview), dan teknik dokumentasi. Adapun fokus penelitian ini adalah penelitian difokuskan pada sejauh mana Desa Nepo menjadi destinasi wisata syariah pada aspek atraksi, akomodasi dan aksesibilitas.

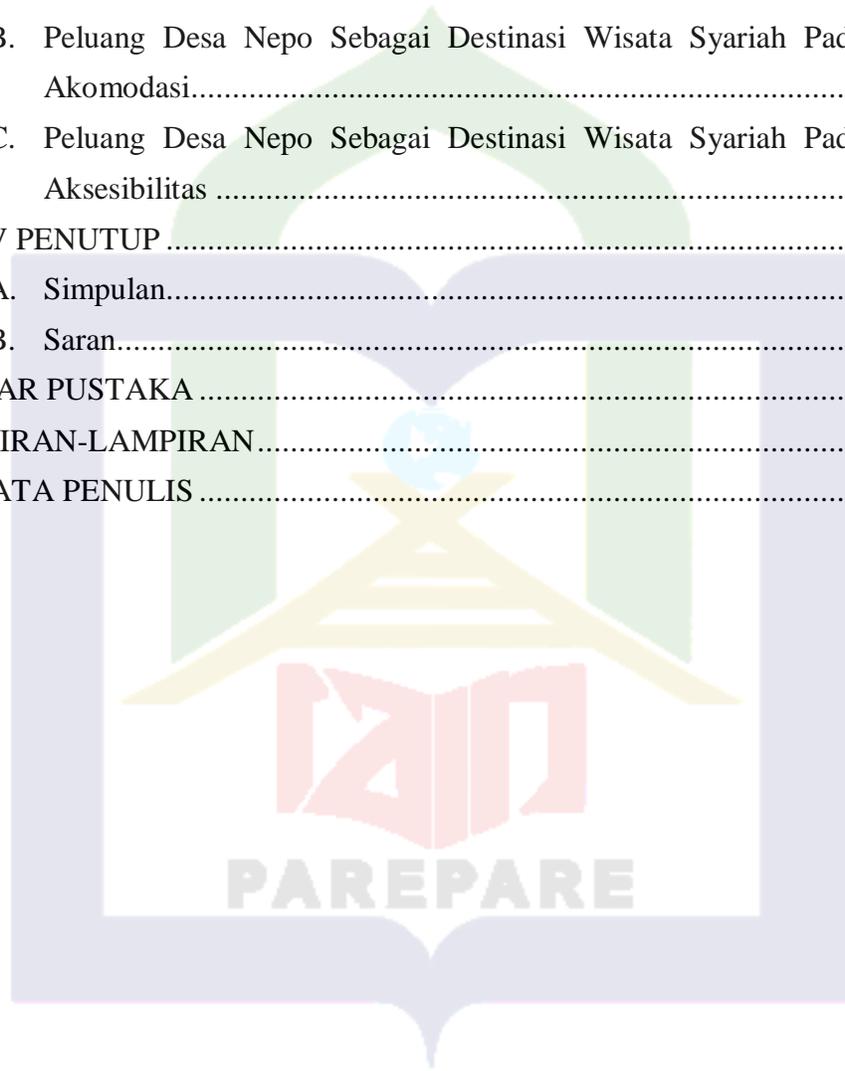
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya desa wisata di Desa Nepo menjadikan Desa Nepo memiliki sebagai desa wisata syariah ditinjau dari aspek atraksi. Desa Nepo belum di kenal sebagai wisata syariah atau wisata dengan konsep islami. Tetapi memiliki peluang dijadikan sebagai wisata syariah dari aspek atraksi dengan melakukan pengembangan berupa pembangunan museum masjid Habibie. Peluang Desa Nepo sebagai desa wisata syariah ditinjau dari aspek akomodasi yang tentu memiliki peluang dalam hal *Home Stay* yang disediakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan yang berkunjung. Peluang Desa Nepo sebagai desa wisata syariah ditinjau dari aspek aksesibilitas memiliki peluang tetapi perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Agar wisatawan yang datang juga memiliki kenyamanan serta kepuasan dalam berwisata. Desa Nepo memiliki peluang dijadikan sebagai desa wisata syariah tetapi tidak terlalu menekankan pada konsep syariah, di karenakan hal itu kan berpengaruh kepada jumlah pengunjung setiap harinya. Melihat wisatawan di Desa Nepo tidak hanya wisatawan lokal, tetapi juga mancanegara maka dengan itu konsep syariah di berlakukan melihat wisatawan yang dtang berkunjung.

Kata kunci : *Destinasi Wisata Syariah, Atraksi, Akomodasi, Aksesibilitas*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teoritis.....	14
1. Destinasi Wisata.....	14
2. Pariwisata Syariah.....	32
C. Kerangka Konseptual.....	44
D. Kerangka Pikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
C. Fokus Penelitian.....	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	49

F. Uji Keabsahan Data	51
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah Pada Aspek Atraksi	53
B. Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah Pada Aspek Akomodasi.....	59
C. Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah Pada Aspek Aksesibilitas	63
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	74
BIODATA PENULIS	108



DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Halaman
1.1	Perbandingan Penelitian Relevan	12
2.1	Bagan Kerangka Pikir	46



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Instrument Penelitian	75
2.	Transkrip Wawancara	78
3.	Surat Keterangan Wawancara	82
4.	Surat Izin Penelitian dari Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare	88
5.	Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru	89
6.	Surat Keterangan Selesai Meneliti Pada Kantor Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	90
7.	Dokumentasi	91
8.	Data Bumdes Desa Nepo	
9.	Data RKPDDes Nepo	105
10.	Biodata Penulis	108

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

3. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf,transliterasinyaberupagabunganhuruf,yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

نا / ناي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
و	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

5. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu‘ima</i>
عَدُوٌّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta‘murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau‘</i>

شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *Umirtu*

9. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
ن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan integral pembangunan yang semakin dipertimbangkan oleh negara-negara di seluruh dunia. Pengaruh pembangunan pariwisata terhadap perkembangan regional, terutama peningkatan percepatan pembangunan dan perekonomian wilayah cukup besar. Hal ini disebabkan pembangunan pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi prioritas, khususnya negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan *World Economy Forum in Geneva, Switzerland*.¹

Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata ini, maka suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu. Dengan meningkatnya waktu luang sebagai akibat lebih singkatnya hari kerja dan didukung oleh meningkatnya penghasilan maka aktivitas kepariwisataan akan semakin meningkat.²

Pemerintah Indonesia telah menyadari betapa pentingnya peranan pariwisata lokal dalam upaya membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 pasal 4, pembangunan kepariwisataan Nasional bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air,

¹World Economy Forum In Geneva-Switzerland, *Travel & Tourism Competitiveness Report* (2009)

²Millian Satria Yuwana, Analisis Permintaan Kunjungan Objek Wisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara (*Skripsi*: Universitas Diponegoro. 2010), h. 1.

memperkokuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar bangsa.³

Pariwisata Syariah didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Adapun prinsip syariah yaitu prinsip hukum islam berkaitan berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.

Dewasa ini, pariwisata berbasis syariah telah menjadi sebuah istilah baru dalam perkembangan pariwisata diberbagai belahan dunia. Esensi dari pariwisata syariah merujuk pada usaha menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa kebermanfaatan bagi dirinya maupun lingkungan.⁴

Wisata syariah sebenarnya tidak jauh beda dengan wisata pada umumnya. Namun wisata syariah lebih mengarah pada kebutuhan wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhan mereka. Diantara lain adanya rumah makan yang bersertifikat halal, tersedianya masjid/ musholla di tempat umum, adanya fasilitas kolam renang terpisah antara pria dan wanita.⁵

Saat ini konsep syariah telah menjadi istilah dalam ekonomi global, mulai dari produk makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup, banyak negara yang mulai memperkenalkan produk wisatanya dengan konsep halal dan islami. Pariwisata halal adalah segmen pasar yang berkembang pesat tidak hanya di negara-negara Muslim tetapi secara global. Bahkan negara seperti Jepang, Australia, Thailand, Selandia, memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Pengembangan wisata halal di Thailand memfokuskan pada layanan hotel halal, makanan halal dan layanan spa halal.

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 *tentang Kepariwisataan*

⁴Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta,2016), h. 1.

⁵Inten Eqa Saputri, Analisis Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Studi Objek Wisata Pantai Seruni Bantaeng (*Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020) h.49.

Setiap kabupaten atau kota tentu memiliki potensi kekayaan yang mana akan berbeda-beda jenis dan bentuknya, potensi serta peluang aset tersebut dapat memiliki 4 nilai keuntungan yaitu ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Seiring dengan pesatnya perkembangan industri pariwisata sekarang ini, diperlukan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang kemajuan pariwisata. Hal ini disebabkan karena sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang menunjang peningkatan pendapatan daerah. Pariwisata merupakan fenomena yang muncul karena adanya interaksi antara wisatawan, penyedia jasa/industri wisata, dan pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung kegiatan wisata. Berbagai interaksi tersebut membentuk suatu sistem yang saling terhubung satu dengan lainnya.

Menurut Ismail, wisata halal (*halal tourism*) merupakan kegiatan dalam pariwisata yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaram islam.⁶

Landasan hukum pariwisata halal adalah undang undang nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan juga undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang nomor 10 tahun 2009 selanjutnya disingkat dengan UU Kepariwisata pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa, pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.⁷

Kemampuan mengenali peluang (*opportunity Recognition*) adalah penemuan ide untuk menciptakan bisnis baru dan pencarian informasi mengenai pasar dan teknologi yang memungkinkan. Kemampuan melibatkan ide-ide yang baru, layak, berharga, legal dan memiliki potensi keuntungan.⁸

Pengetahuan dan kesadaran akan produk halal menjadikan pertumbuhan industri halal semakin meningkat. Meningkatnya industri halal tersebut,

⁶Satriana ED, Faridah HD, *Jurnal Of Halal Product and Research* (2018), h.34.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 *tentang Kepariwisataan*

⁸ Dwi Putra Buana Sakti, Baiq Nadia Nirwana, Rionaldi Gigih Imam Pratama, Yulia Prayanti, Pendidikan Kewirausahaan, Opportunity Recognition, Minat Berwirausaha (*Tesis Manajemen Universitas Mataram*, 2020) h.272.

memunculkan wisata halal (*halal tourism*) sebagai fenomena baru. Hal ini juga didukung oleh berbagai literatur yang menjelaskan bahwa wisatawan muslim peduli terhadap konsumsi produk dan layanan sesuai syariah ketika berkunjung ke tempat wisata. Minat terhadap wisata halal (*halal tourism*) mengalami pertumbuhan yang meningkat. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya wisatawan muslim dari tahun ke tahun. Untuk mengeksplorasi potensi besar wisata halal tersebut, banyak negara (baik negara dengan mayoritas muslim maupun non-muslim) mulai menyediakan produk, fasilitas, dan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Atraksi adalah suatu hal yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di setiap destinasi dan objek wisata. Bisa berupa keindahan alam, budaya masyarakat setempat, bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan ini harus unik dan berbeda. Atraksi dalam pariwisata atau biasa dikenal dengan istilah daya tarik wisata merupakan fokus utama penggerak pariwisata pada sebuah destinasi wisata. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan disebut dengan daya tarik wisata atau dikenal dengan istilah *tourist attraction*.

Akomodasi menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai agar wisatawan merasa nyaman dan aman ketika berada di lokasi tersebut. Akomodasi yang dimaksud dalam pariwisata seperti hotel, *home stay*, *villa*, rumah makan, gedung pertunjukan dan sebagainya.

Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan.

Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment. Arti dari pernyataan tersebut adalah Desa Wisata merupakan suatu tempat atau wadah bagi wisatawan untuk dapat merasakan secara langsung bagaimana kehidupan tentang

pedesaan.⁹ Menurut Nuryanti, Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Salah satu pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam bidang pariwisata adalah melalui pengembangan Desa Wisata.¹⁰

Kabupaten Barru berada di antara dua kota Makassar dan Parepare dengan memanjang jarak skitar 80 km, kepanjangannya dua kali lipat dari pada dua kabupaten Pangkep dan Maros. Penduduknya dihuni suku bugis dengan tiga etnis besar To Tanete, To Berru dan To Nepo.¹¹ Kabupaten Barru selain terkenal dengan Tugu Payung yang sangat ikonik, mempunyai ragam destinasi wisata alam yang sangat eksotis dan sangat instagenik. Posisi Kabupaten Barru berada pada jalur trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata yang terletak antara kota Makassar dan kota Parepare. Dengan luas wilayah yang telah mencapai sekitar 1.174,72 km², Kabupaten Barru memiliki potensi obyek wisata yang cukup banyak dan variatif, baik berupa wisata alam, wisata pantai/bahari, dan wisata budaya/sejarah.

Nepo adalah nama salah satu dari delapan unit pemerintahan tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Secara geografis, Desa Nepo berada di wilayah dataran rendah dan dkitari alam pegunungan. Letak administratifnya dapat diketahui dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kota Pare-Pare, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Palanro dan Kelurahan Mallawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Manuba dan sebelah timur

⁹John Wiley & Sons, *Tourism Planning, An Integrated And Sastainalde Development Approach* (1991).h.166

¹⁰Ernie Yuliat, Djoko Suwandono, *Arahan Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Nongkosawit Sebagai Destinasi Wisata Kota Semarang*(Universitas Diponegoro,2016) h. 266

¹¹ Drs. H. Andi M. Anwar Zaenong, M.A., M.Si, *Barru Berpotensi Dimekarkan Dengan Pembentukan Kabupaten Nepo* (Dosen IAIN PARE-PARE, 2016) . h.1.

berbatasan dengan Kabupaten Soppeng. Desa Nepo memiliki luas wilayah kurang lebih 2.233 m², dan membawahi delapan wilayah tingkat dusun.¹²

Orbitasi Desa Nepo terhadap ibukota kecamatan (Kecamatan Mallusetasi), berjarak kurang lebih 3 km, sedangkan ke ibukota kabupaten (Kota Barru) mencapai jarak sekitar 36 Km. Adapun jika dari Kota Makassar (ibukota Provinsi Sulawesi Selatan), maka jarak tempuh yang harus dilalui untuk mencapai desa ini adalah sekitar 133 km dengan waktu tempuh tidak kurang dari 3 jam.¹³

Desa Nepo merupakan salah satu desa di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Nepo dibentuk pada tahun 1972. Nepo adalah nama salah satu dari delapan unit pemerintahan tingkat desa dan kelurahan dalam wilayah Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Secara geografis, Desa Nepo berada di wilayah dataran rendah dan dikitari alam pegunungan. Letak administratifnya dapat diketahui dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan Kota Pare-Pare, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Palanro dan Kelurahan Mallawa, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Manuba dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng. Luas wilayah Desa Nepo kurang lebih 9.497,25 HA dengan evalesi sangat tinggi dan tofografi yang berbukit dan lembah curam.

Desa Nepo dikelilingi dengan area persawahan, yang dimana mata pencaharian utama masyarakat yaitu petani, berkebun, dan ternak. Salah satu yang menjadi visi misi dari Desa Nepo yaitu mewujudkan Desa Agro Wisata. Berdirinya Desa Nepo sebagai Desa Wisata sudah dapat diartikan dalam agro wisata dengan peningkatan dan pengembangan wisata di dalamnya.

Orbitasi Desa Nepo terhadap ibukota kecamatan (Kecamatan Mallusetasi), berjarak kurang lebih 4 km, sedangkan ke ibukota kabupaten (Kota Barru) mencapai

¹²Ansar, *The Tradition Of Manre Sipulung For Watangnepo Society In Nepo Village, Barru Regency* (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2016). h. 79

¹³Ansar, *The Tradition Of Manre Sipulung For Watangnepo Society In Nepo Village, Barru Regency*(Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2016). h. 79

jarak sekitar 32 Km. Adapun jika dari Kota Makassar (ibukota Provinsi Sulawesi Selatan), maka jarak tempuh yang harus dilalui untuk mencapai desa ini adalah sekitar 135 km dengan waktu tempuh tidak kurang dari 3 jam.¹⁴

Desa Nepo yang memiliki wilayah topografi umumnya tanah datar, dihuni oleh etnis Bugis. Karena itu di wilayah tersebut dalam segi bahasa, penduduknya menggunakan bahasa Bugis. Adapun jumlah keseluruhan penduduknya sampai padaakhir tahun 2022, tercatat sebanyak 3.242 jiwa, terdiri atas 1.604 laki-laki dan 1.638 perempuan. Usia 0-17 tahun sebanyak 978 jiwa, usia 18-55 tahun 1.829 jiwa dan usia 55 keatas sebanyak 435 jiwa.

Desa Nepo yang memiliki wilayah topografi umumnya tanah datar, dihuni oleh etnis Bugis. Karena itu di wilayah tersebut dalam segi bahasa, penduduknya menggunakan bahasa Bugis. Adapun jumlah keseluruhan penduduknya sampai padaakhir tahun 2022, tercatat sebanyak 3.242 jiwa, terdiri atas 1.604 laki-laki dan 1.638 perempuan.

Penelitian ini berkaitan dengan pariwisata halal dan bukan pertama kali diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun, peneliti sekiranya melakukan penelitian yang berbeda dari yang telah ada bahwa secara garis besar peneliti sebelumnya menekankan pada potensi pengembangan wisata halal. Namun, dalam peneliti ini memuat tentang sejauhmana potensi Desa Nepo dalam menjadikan Desa Wisata Syariah.

Penelitian dilakukan oleh Inten Eqa Saputri, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Sebagai Peningkatan Ekonomi Masyarakat Studi Objek Wisata Pantai Seruni Bantaeng)” hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pengembang wisata syariah. Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pengembangan pariwisata halal serta peningkatan pendapatan

¹⁴Ansar, *The Tradition Of Manre Sipulung For Watangnepo Society In Nepo Village, Barru Regency* (Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan, 2016). h. 79

penduduk melalui wisata syariah. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai wisata bahari sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada peningkatan destinasi wisata halal di Desa Nepo.

Alasan peneliti menetapkan lokasi penelitian ini dikarenakan Desa Nepo merupakan Desa yang memiliki peluang dan potensi menjadi Desa Wisata berbasis Syariah, Desa Nepo memiliki beberapa destinasi wisata yang mampu menarik perhatian Wisatawan Lokal maupun Manca Negara, kemudian Desa Nepo memiliki peninggalan sejarah yang patut dikenal oleh wisatawan lokal maupun manca negara, selain itu Desa Nepo merupakan Desa yang tidak hanya memiliki satu destinasi wisata namun lebih daripada itu memiliki berbagai pilihan destinasi wisata seperti wisata religi, wisata alam, wisata kuliner, dan wisata budaya.

Masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata dapat terlibat untuk menunjang kegiatan objek wisata oleh wisatawan mancanegara atau domestik dalam penyediaan makanan dan minuman, tempat tinggal (*home stay*), sarana dan prasarana transportasi dan kegiatan lainnya. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan wisata diharapkan akan mampu memberikan tambahan pendapatan disamping pendapatan disektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu, dengan adanya desa wisata ini diharapkan mampu menambah pendapatan masyarakat serta memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang tidak belum memiliki pekerjaan.

Masyarakat Desa Nepo memiliki minat yang kurang tentang wisata halal dari segi keuntungan, pengelolaan, sarana dan prasarana dikarenakan kurangnya sosialisasi dan ilmu pengetahuan mengenai desa wisata itu sendiri. Masyarakat menganggap destinasi wisata syariah bukanlah hal penting yang patut dikembangkan dan didalami karena masyarakat sendiri belum melihat dampak dari desa wisata syariah.

Namun, masih banyak para pelaku bisnis dan pihak yang terlibat di sektor pariwisata terkendala dalam pemahaman (baik produk, fasilitas maupun infrastruktur) dari wisata halal itu sendiri. Sektor pariwisata memainkan peran penting dalam ekonomi dunia karena dianggap sebagai salah satu pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di negara maupun di Desa Nepo itu sendiri. Sehingga

pariwisata dapat pula dipandang sebagai salah satu sumber paling penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya peningkatan wisatawan merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan sektor pariwisata.

Sehingga dengan ini dampak dari penelitian ini nantinya akan memberikan pengaruh positif baik Pemerintah Desa Nepo maupun masyarakat bahwa ada banyak keuntungan yang bisa diraih dari hasil pengembangan Desa Wisata Syariah baik secara ekonomi maupun secara kunjungan daya tarik destinasi wisata. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengambil judul; “Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru Sebagai Destinasi Wisata Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah pada aspek atraksi?
2. Bagaimana peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah pada aspek akomodasi?
3. Bagaimana peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah pada aspek aksesibilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah pada aspek atraksi
2. Untuk mengetahui peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah pada aspek akomodasi
3. Untuk mengetahui peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah pada aspek aksesibilitas

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki nilai baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoretis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu kepariwisataan.
- b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji ilmu kepariwisataan, terutama mengenai desa wisata.

b. Kegunaan Praktis

a. Bagi masyarakat dan pemerintah

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi pemerintah desa wisata.
- 2) sebagai bahan masukan agar dapat lebih meningkatkan pembangunan agar dapat menarik perhatian pengunjung.

b. Bagi akademisi

Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam terkhusus untuk Program Studi pariwisata Syariah.

c. Bagi Peneliti

Sebagai acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan bagi penelitian ini dan memberikan manfaat di dunia pariwisata serta dapat memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai Pariwisata Syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sepanjang penelusuran yang akan diteliti maka dilakukan peninjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek ataupun permasalahan yang diteliti sehingga bisa digambarkan perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inten Eqa Saputri jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Studi Objek Wisata Pantai Seruni Bantaeng”.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Murtini, jurusan antropologi sosial fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas Sumatera Utara Medan tahun yang berjudul “Pengembangan Wisata Syariah Di Kota Banda Aceh”.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Sarawati Ero Lewar dengan judul “Strategi Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Lasusua Kolaka Utara Sebagai Wisata Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI”.¹⁷

¹⁵Inten Eqa Saputri, Analisis Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Studi Objek Wisata Pantai Seruni Bantaeng (*Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020) h. 6.

¹⁶Ratna Murtini, Pengembangan Wisata Syariah Di Kota Banda Aceh (*skripsi* universitas Sumatera Utara Medan, 2018)

¹⁷ Sarawati Ero Lewar, Strategi Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Lasusua Kolaka Utara Sebagai Wisata Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI (*Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 54.

Persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang akandilaksanakan maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Inten Eqa Saputri jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Muhammadiyah Makassar (2020) ¹⁸	Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat, Studi Objek Wisata Pantai Seruni Bantaeng	Penelitian ini membahas mengenai peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Bantaeng	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai penegmbangan wisata halal, kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif
2.	Ratna Murtini, jurusan antropologi sosial fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas	Pengembangan Wisata Syariah Di Kota Banda Aceh	Pada penelitian tersebut membahas tentang strategi pengembangan wisata syaria di Kota Banda Aceh	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas tentang pengembangan wisata syariah dan menggunakan metode penelitian

¹⁸Inten Eqa Saputri, Analisis Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Studi Objek Wisata Pantai Seruni Bantaeng (*Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020) h. 6.

	Sumatera Utara Medan (2018) ¹⁹			kualitatif
3.	Sarawati Ero Lewar , Universitas Muhammadiyah Makassar (2020) ²⁰	Strategi Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Lasusua Kolaka Utara Sebagai Wisata Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI	Penelitian ini membahas mengenai strategi wisata pantai yang bekerja sama dengan dinas pariwisata	Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengembangan wisata syariah serta menggunakan metode penelitian kualitatif

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Inten Eqa Saputri terdapat perbedaan dalam hal menganalisis potensi pengembangan wisata halal dengan melihat pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Persamaan terdapat pada pengembangan wisata halal yang nantinya menjadi hal utama dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini pengkaji potensi-potensi dalam pengembangan wisata halal serta melihat sejauh mana dampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ratna Murtini, melihat dari judul penelitian yang membahas tentang pengembangan wisata syariah. Dimana persamaan terletak pada metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan uji lapangan. Perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan penelitian ini tidak membahas mengenai sejauh mana potensi atau kelayakan wisata syariah di lokasi tersebut. Hasil dari penelitian ini

¹⁹Ratna Murtini, Pengembangan Wisata Syariah Di Kota Banda Aceh (*Skripsi* universitas Sumatera Utara Medan, 2018)

²⁰Sarawati Ero Lewar, *Strategi Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Lasusua Kolaka Utara Sebagai Wisata Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI* (*Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 54.

nantinya dapat dijadikan referensi melihat pengembangan wisata syariah di Kota Banda Aceh.

Dalam penelitian yang Sarawati Ero Lewer, membahas mengenai strategi pengembangan wisata pantai pasir putih yang ada di Lasusua, Kolaka Utara yang juga menjadi salah satu wisata syariah, perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu objek yang berbeda yaitu penelitian terdahulu memiliki objek wisata pantai sedangkan penelitian ini objek desa wisata yang dimana destinasi yang ditawarkan yaitu bernuansa penguungan, air terjun, dll.

B. Tinjauan Teoritis

1. Destinasi Wisata

1) Pengertian Destinasi Wisata

Destinasi adalah tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit).²¹

Pariwisata merupakan konsep yang sangat multidimensional. Tak bisa dihindari bahwa beberapa pengertian pariwisata dipakai oleh para praktisi dengan tujuan dan perspektif yang berbeda sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Definisi pariwisata memang tidak dapat sama persis diantara para ahli. Berikut adalah beberapa pengertian pariwisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari satu tempat ketempat yang lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

²¹Hary Hermawan, Pengembangan Destinasi Wisata Pada Tingkat Tapak Lahan Dengan Pendekatan Analisis Swot (*Jurnal* 2017), h. 66

Pengembangan di dalam sektor pariwisata akan berhasil dengan baik, apabila masyarakat luas dapat lebih berdampak atau ikut serta secara aktif. Agar masyarakat luas dapat lebih dapat berdampak serta dalam pembangunan kepariwisataan, maka masyarakat perlu diberi pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata serta manfaat dan keuntungan-keuntungan apa yang akan diperoleh.

Disamping itu, masyarakat juga harus mengetahui hal-hal yang dapat merugikan yang diakibatkan oleh adanya pariwisata tersebut. Pembangunan disektor kepariwisataan perlu ditingkatkan dengan cara mengembangkan dan mendayagunakan sumber-sumber serta potensi kepariwisataan nasional maupun daerah agar dapat menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan dalam rangka memperbesar penerimaan devisa atau pendapatan asli daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja terutama bagi masyarakat setempat.

Dampak pariwisata saat ini antara lain adalah: pertama, dampak ekonomi yaitu, sebagai sumber devisa Negara. Kedua, dampak sosial yaitu, sebagai penciptaan lapangan pekerjaan dan yang terakhir adalah dampak Pemasaran Pariwisata, kebudayaan yaitu, memperkenalkan kebudayaan dan kesenian. Ketiga point diatas dapat dijelaskan, yaitu sebagai berikut.

a. Dampak Ekonomi

- 1) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah berasal dari pembelanjaan dan biaya yang dikeluarkan wisatawan selama perjalanan dan persinggahannya seperti untuk hotel, makan dan minum, cenderamata, angkutan dan sebagainya. Selain itu juga, mendorong peningkatan dan pertumbuhan di bidang pembangunan sektor lain. Salah satu ciri khas pariwisata adalah sifatnya yang tergantung dan terkait dengan bidang pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian, berkembangnya kepariwisataan akan mendorong peningkatan dan pertumbuhan bidang pembangunan lain.

2) Pengembangan pariwisata berpengaruh positif pada perluasan peluang usaha dan kerja. Peluang usaha dan kerja tersebut lahir karena adanya permintaan wisatawan. Dengan demikian, kedatangan wisatawan ke suatu daerah akan membuka peluang bagi masyarakat tersebut untuk menjadi pengusaha hotel, wisma, *homestay*, restoran, warung, angkutan dan lain-lain. Peluang usaha tersebut akan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja dan sekaligus dapat menambah pendapatan untuk dapat menunjang kehidupan rumah tangganya.

b. Dampak Sosial

Semakin luasnya lapangan kerja. Sarana dan prasarana seperti hotel, restoran dan perusahaan perjalanan adalah usaha-usaha yang "padat karya". Untuk menjalankan jenis usaha yang tumbuh dibutuhkan tenaga kerja dan makin banyak wisatawan yang berkunjung, makin banyak pula lapangan kerja yang tercipta. Di Indonesia penyerapan tenaga kerja yang bersifat langsung dan menonjol adalah bidang perhotelan, biro perjalanan, pemandu wisata, instansi pariwisata pemerintah yang memerlukan tenaga terampil. Pariwisata juga menciptakan tenaga di bidang yang tidak langsung berhubungan, seperti bidang konstruksi dan jalan.

c. Dampak Kebudayaan

1) Mendorong pelestarian budaya dan peninggalan sejarah. Indonesia memiliki beraneka ragam adat istiadat, kesenian, peninggalan sejarah yang selain menjadi daya tarik wisata juga menjadi modal utama untuk mengembangkan pariwisata. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata akan mengupayakan agar modal utama tersebut tetap terpelihara, dilestarikan dan dikembangkan.

2) Mendorong terpeliharanya lingkungan hidup kekayaan dan keindahan alam seperti flora dan fauna, taman laut, lembah hijau pantai dan sebagainya, merupakan daya tarik wisata. Daya tarik ini harus terus dipelihara dan dilestarikan karena hal ini merupakan modal bangsa untuk mengembangkan pariwisata.

- 3) Wisatawan selalu menikmati segala sesuatu yang khas dan asli. Hal ini merangsang masyarakat untuk memelihara apa yang khas dan asli untuk diperlihatkan kepada wisatawan.

Menurut Penggolongan destinasi adalah seperti berikut :

1. Destinasi sumber daya alam seperti iklim, pantai, hutan.
2. Destinasi sumber daya budaya seperti tempat bersejarah, museum, teater, dan masyarakat lokal.
3. Fasilitas rekreasi seperti taman hiburan.

Ditinjau dari aspek fisik, termasuk destinasi wisata berwujud sumber daya alam dengan potensi budaya. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisataan bahwa unsur produk wisata atau destinasi setidaknya ada 3 yaitu : Attraksi/daya tarik wisata, Ammenities dan Aksebilities biasa disingkat 3A pariwisata. Pengembangan destinasi wisata pada tingkatan tapak lahan setidaknya memperhitungkan 3 poin kunci tersebut.²²

1. Ketentuan Destinasi Wisata

Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

- a. Mewujudkan kemaslahatan umum
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah

²²Hary Hermawan, Pengembangan Destinasi Wisata Pada Tingkat Tapak Lahan Dengan Pendekatan Analisis Swot (*Jurnal* 2017), h. 66

- b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
- a. Kemusyrikan dan khurafat
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi
 - c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah

Daerah tujuan wisata atau sering juga dinamakan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih, wilayah administrative, yang didalamnya terdapat daya tarik wisata. Terdapat fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan (Undang-undang Kepariwisata nomor 10 tahun 2009). Setiap wilayah memiliki daya tarik yang berbeda, bergantung dari kondisi alam geografis daerah, latar belakang sejarah dan Perkembangan serta kepercayaan yang dianut masyarakat tersebut.

Hal-hal tentang wisata syariah yaitu :

1. Destinasi yang aman dan ramah untuk aktifitas liburan keluarga
 - a. Destinasi wisata yang ramah keluarga
 - b. Kemanan secara umum maupun khusus untuk wisatawan muslim
2. Fasilitas dan pelayanan yang ramah muslim
 - a. Pilihan dan jaminan kehalalan makanan
 - b. Fasilitas sholat
 - c. Pilihan akomodasi
3. Pemasaran dan kesadaran destinasi tentang wisata syariah
 - a. Kemudahan berkomunikasi
 - b. Kesadaran tentang kebutuhan wisatawan muslim dan usaha untuk memenuhinya
 - c. Transportasi udara

d. Persyaratan Visa²³

Pemilihan destinasi wisata yang sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam juga menjadi pertimbangan utama dalam mengaplikasikan konsep wisata syariah, setiap destinasi wisata yang akan dituju haruslah sesuai dengan nilai-nilai keislaman seperti memiliki fasilitas ibadah yang memadai berupa tersedianya sajadah, mukena dan sarung dengan kondisi kebersihan yang terjaga dan mencukupi kebutuhan. Beberapa aspek lainnya yang mendukung sepertimasjid ramah terhadap perempuan dan anak. Dalam rangka memenuhi kebutuhan muslim perempuan, masjid di desain dengan lebih banyak ruang bagi perempuan. Serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁴

Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Berhasilnya suatu tempat berkembang menjadi daerah tujuan wisata sangat tergantung kepada tiga faktor utama yaitu antara lain :

- a. Atraksi, dapat dibedakan menjadi : pertama, Tempat, umpunya tempat dengan iklim yang baik, pemandangan yang indah atau tempat-tempat bersejarah. Kedua, Kejadian/Peristiwa : kongres, pameran atau peristiwa-peristiwa olah raga, festival dan sebagainya.
- b. Mudah dicapai (aksesibilitas) : Tempat tersebut dekat jaraknya, atau tersedianya transportasi ketempat itu secara teratur, sering, mudah, nyaman, dan aman.
- c. Amenitas, tersedianya fasilitas-fasilitas seperti tempat penginapan, restoran, hiburan, transportasi lokal yang memungkinkan wisatawan bepergian ketempat itu serta alat-alat komunikasi lainnya.²⁵

²³MasterCard dan Crescenrating. “*Global Muslim Tourism Index 2015*”, (2022)

²⁴Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis*, h. 13

²⁵Unggul Priyadi, *Pariwisata syariah : Prospek dan perkembangannya*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2016)

Obyek dalam pariwisata syariah dapat berupa wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata cagar alam (taman konservasi), wisata pertanian (agrowisata) dan wisata buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Sebenarnya destinasi wisata syariah tidak bisa dispesifikkan, hanya saja wisata syariah ini sebagaimana konsep dan karakteristiknya. Didalam kegiatan wisata syariah ini harus ada fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan muslim seperti menyediakan makanan halal, fasilitas shalat, fasilitas di kamar mandi untuk berwudhu, arah kiblat di kamar hotel, informasi waktu sholat, pelayanan saat bulan ramadan, pencantuman label tidak halal untuk mengetahui produk yang tidak bisa dikonsumsi oleh muslim, dan fasilitas rekreasi yang memisahkan antara pria dan wanita. Bisa juga ditambahkan interpretasi objek wisata yang dimasukan unsur nilai-nilai islam sebagai pengingat dan renungan bagi muslim.²⁶

Ada beberapa hal yang menunjang atau menentukan pengembangan suatu obyek wisata. ada lima jenis komponen dalam pariwisata yaitu :

- a. Atraksi wisata : atraksi adalah daya tarik wisatawan untuk berlibur. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumberdaya manusia, budaya dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada peristiwa, bagian utama lain tidak akan diperlukan.
- b. Promosi dan pemasaran : Promosi adalah suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana agar atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi adalah bagian penting.
- c. Pasar wisata(masyarakat pengirim wisata) : pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum / tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motifasi, dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

²⁶Republika, *Apakah Sesungguhnya Pariwisata Syariah.*(2022)

- d. Transportasi : pendapat dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata.
- e. Masyarakat penerima wisatawan yang menyediakan akomodasi dan pelayanan jasa pendukung wisata (fasilitas dan pelayanan).

komponen penting dalam pengembangan pariwisata adalah suatu pengembangan pariwisata yang berkelanjutan memiliki keterkaitan antara turis, warga setempat dan pemimpin masyarakat yang menginginkan hidup lebih baik. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa suatu tempat wisata harus berisikan komponen tersebut untuk menjadi suatu objek wisata yang baik. Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata meliputi :

- a. Obyek dan daya tarik wisata Daya tarik wisata yang juga disebut obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasar pada :
 - 1) Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
 - 2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk mengunjunginya
 - 3) Adanya spesifikasi atau ciri khusus yang bersifat langka
 - 4) Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan
 - 5) Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan dan lain-lain.
 - 6) Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.
- b. Prasarana wisata Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya

di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

- c. Sarana wisata Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya.

Dalam dunia pariwisata hal pokok dalam suatu desa wisata yaitu :

1. Atraksi

Menurut Witt dan Mountinho, atraksi wisata atau daerah tujuan wisata atau daerah tujuan wisata merupakan motivasi utama bagi para wisatawan dalam melakukan kegiatan kunjungan wisata.²⁷

Menurut Suwena dan Widyatmajaja atraksi disebut merupakan komponen yang signifikan dalam menarik wisatawan, atraksi merupakan modal utama (*tourism resources*) atau merupakan sumber dari kepariwisataan.²⁸ Dapat disimpulkan bahwa atraksi wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keindahan, yang bernilai, baik yang berupa suatu keanekaragaman, yang memiliki keunikan, baik dalam kekayaan budaya maupun hasil buatan manusia (*man made*) yang menjadi faktor daya tarik dan menjadi tujuan wisatawan untuk berkunjung, yang menjadikan wisatawan termotivasi untuk melakukan wisata ke objek wisata tersebut.

Atraksi (daya tarik) merupakan daya tarik utama orang melakukan perjalanan, atraksi memiliki dua fungsi yaitu sebagai daya pikat, perangsang orang untuk melakukan perjalanan dan sebagai pemberi kenyamanan dan puas terhadap penunjang.

Atraksi merupakan produk sebuah destinasi. Menurut Karyono (1997) atraksi atau daya tarik wisata berkaitan dengan apa yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di sebuah destinasi wisata. Atraksi bisa berupa keindahan dan keunikan

²⁷Syakir Kamli Ainul Fitroh, *Pengaruh Atraksi Wisata Dan Motivasi Wisatawan Terhadap Keputusan Berkunjung* (2017), h. 19

²⁸Syakir Kamli Ainul Fitroh, *Pengaruh Atraksi Wisata Dan Motivasi Wisatawan Terhadap Keputusan Berkunjung* (2017), h. 19

alam, budaya masyarakat setempat, serta atraksi buatan. Menurut Soekadijo (2016) mengungkapkan bahwa atraksi wisata yang baik juga dapat mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya. Menahan mereka ditempat wisata atraksi dalam waktu yang cukup lama dan memberikan kepuasan kepada wisatawan yang berkunjung.

Dari teori diatas dapat disimpulkan bahwa atraksi wisata adalah daya tarik dari objek pariwisata ataupun hasil kesenian satau daerah tersebut yang dapat menarik/turis asing berkunjung menuju ke tempat wisata tersebut.

Atraksi adalah suatu hal yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di setiap destinasi dan objek wisata. bisa berupa keindahan alam, budaya masyarakat setempat, bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan ini harus unik dan berbeda. Atraksi dalam pariwisata atau biasa dikenal dengan istilah daya tarik wisata merupakan fokus utama penggerak pariwisata pada sebuah destinasi wisata. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan disebut dengan daya tarik wisata atau dikenal dengan istilah *tourist attraction*. Atraksi wisata didasarkan atas sumber alam, budaya, etnis dan hiburan.

Atraksi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang permanen dalam tujuan dalam tujuan wisata. Atraksi ditujukan kepada pengunjung dengan tujuan utama untuk memberikan hiburan, bersenang-senang, pendidikan dan menyaksikan sesuatu yang menarik. Bisa juga ditambahkan interpretasi objek wisata yang dimasukan unsur nilai-nilai islam sebagai pengingat dan renungan bagi wisatawan muslim. Paling penting tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.

Objek dalam pariwisata halal dapat berupakunjungan wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata suaka alam (taman nasional), ekopariwisata dan wisata buatan yang diinterpretasikan sesuai dengan kaidah- kaidah Islam.

Atraksi wisata di bedakan menjadi 3 jenis, diantaranya:

- 1) *Natural Attractions*(daya tarik alam), atraksi ini biasa dikenal sebagai daya tarik alam seperti pemandangan, pemandangan laut, danau, air terjun, kebun raya, agrowisata, gunung berapi, termasuk kelompok fauna dan flora (kebun binatang).
- 2) *Build Attractions*(daya tarik buatan), daya tarik buatan berupa bangunan dengan arsitek yang menarik, rumah adat, bangunan modern, Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
- 3) *Cultural Attractions*(atraksi budaya), atraksi ini berupa atraksi budaya, kesenian, museum, upacara keagamaan, festival kesenian, dan sebagainya.

Syarat atraksi dalam menarik daya tarik wisata, diantaranya :

- 1) Tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Hal tersebut berarti bahwa daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya sebagai hiburan.
- 2) Tempat wisata tersebut disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan untuk tinggal lebih lama.
- 3) Daerah tujuan wisata harus memiliki fasilitas untuk berbelanja (menyediakan oleh-oleh) sebagai hal yang dibawah pulang ke tempat asal.
- 4) Kemudahan aksesibilitas untuk menunjang daya tarik wisata, seperti kendaraan yang digunakan dan berapa lama untuk tiba ditempat tujuan.
- 5) Daerah tujuan wisata terdapat tempat untuk wisatawan tinggal selama berlibur.

Atraksi dan objek wisata yang akan dijual kepada wisatawan, harus memiliki tiga syarat, yaitu :

- 1) Sesuatu untuk dilihat
- 2) Sesuatu yang harus dilakukan
- 3) Sesuatu untuk dibeli

Faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi wisata

Menurut Sunaryo ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi atraksi wisata yaitu :

- 1) Faktor alam
 - a) Pantai
 - b) Pemandangan alam
 - c) Pengunungan
 - d) Hutan
- 2) Faktor kebudayaan
 - a) Museum
 - b) Candi
 - c) Galeri²⁹

Indikator atraksi wisata

Menurut Maryani ada beberapa indikator atraksi wisata yaitu :

- 1) Daya tarik yang dapat disaksikan
Hal ini menisyaratkan bahwa daerah harus ada sesuatu yang menjadi daya tarik wisata, contohnya permandian alam, kegiatan atau kesenian
- 2) Aktivitas wisata yang dapat dilakukan
Hal ini mengisyaratkan bahwa tempat wisata dapat menyaksikan sesuatu yang menarik perhatian wisatawan.
- 3) Sesuatu yang dapat dibeli
Hal ini mengisyaratkan bahwa tempat tujuan wisata mestinya menyediakan beberapa fasilitas pengunjung untuk berbelanja baik oleh-oleh yang bisa dibawa pulang.

2. Akomodasi

Menurut Sunaryo, amenitas merupakan fasilitas dasar seperti jalan raya, transportasi, akomodasi dan pusat informasi pariwisata yang berfungsi agar

²⁹ Sita Sari Ningsihh, *Pengaruh Amenitas, Atraksi Wisata, dan Aksesibilitas Terhadap Loyalitas Wisatawan ke Destinasi Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Medan, 2020), h. 22

wisatawan yang berkunjung, merasakan kenyamanan. Sedangkan menurut Sugiama, amenitas adalah segala fasilitas pendukung yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan saat melakukan kegiatan wisata disuatu destinasi wisata kebutuhan tersebut. Sedangkan menurut Cahyani dan Aditya, amenitas yaitu berbagai fasilitas seperti tempat penginapan, restoran dan transportasi lokasi mungkin wisatawan berpergian di tempat tersebut serta alat-alat komunikasi lainnya.³⁰

Wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata membutuhkan fasilitas yang menunjang untuk mempengaruhi kebutuhan perjalanan tersebut. Komponen fasilitas dan pelayanan (amenitas) biasanya terdiri dari unsur alat transportasi, fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum dan fasilitas penunjang lainnya bersifat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan.

Faktor akomodasi juga menjadi pertimbangan wisatawan ketika membuat keputusan untuk berkunjung di suatu lokasi wisata karena akomodasi berkaitan dengan ketersediaan akan tempat. Akomodasi dapat berupa tempat penginapan, beristirahat, makan, minum, dan mandi. Akomodasi biasanya disediakan oleh agen travel dan di pilihkan yang lokasinya berdekatan dengan destinasi wisata yang uga biayana sesuai dengan tarif pembayaran.

Akomodasi menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai agar wisatawan merasa nyaman dan aman ketika berda di lokasi tersebut. Akomodasi yang dimaksud dalam pariwisata seperti hotel, *home stay*, *villa*, rumah makan, gedung pertunjukan dan sebagainya.

Guest House Syari'ah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *guest house* dan syari'ah. Pengertian dari *guest house* adalah sejenis akomodasi yang dimiliki perusahaan, instansi pemerintah/swasta, yang diperuntukkan bagi para tamu-tamunya yang menginap dan mendapatkan fasilitas makan, minum serta pelayanan lainnya yang disediakan secara sederhana dan gratis atau ditanggung perusahaan/instansi

³⁰Sita Sari Ningsihh, *Pengaruh Amenitas, Atraksi Wisata, dan Aksesibilitas Terhadap Loyalitas Wisatawan ke Destinasi Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Medan, 2020), h. 17

yang mengundangnya, tetapi bila *guest house* ini dimiliki oleh perusahaan swasta yang dibuka untuk umum, maka sifatnya sama dengan hotel, yaitu bertujuan mencari keuntungan hanya pelayanannya yang secara sederhana. Maka, pengertian *guest house* syari'ah adalah sejenis akomodasi yang dimiliki perusahaan, instansi pemerintah/swasta, yang diperuntukkan bagi para tamu-tamunya yang menginap dan mendapatkan fasilitas makan, minum serta pelayanan lainnya yang disediakan secara sederhana dan sifatnya sama dengan hotel, yaitu bertujuan mencari keuntungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Salah satu contoh dari bentuk pelayanan ini misalnya hotel yang tidak menyediakan makanan ataupun minuman yang mengandung alkohol dan memiliki kolam renang serta fasilitas spa yang terpisah untuk pria dan wanita. Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami.

Menurut Sunaryo, ada beberapa indikator akomodasi (fasilitas), Kelengkapan, kebersihan dan kerapian fasilitas perusahaan yang dilengkapi oleh atribut yang menyertainya dan didukung dengan kebersihannya dan kerapian saat wisatawan menggunakan fasilitas. Kondisi dan fungsi fasilitas dengan baik dan tidak mengalami kerusakan. Kemudahan menggunakan Fasilitas yang sudah familier bagi wisatawan sehingga wisatawan dapat menggunakannya dengan mudah.³¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi akomodasi

Menurut Sunaryo, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi akomodasi yaitu :

1) Tempat makan dan minum

Tentu saja dalam melakukan makan dan minum sehingga perlu disediakan pelayanan makan dan minum sehingga perlu disediakan pelayanan makanan dan minuman. Hal tersebut mengantisipasi bagi para wisatawan yang tidak membawa bekal saat melakukan perjalanan wisata.

³¹Sita Sari Ningsihh, *Pengaruh Amenitas, Atraksi Wisata, dan Aksesibilitas Terhadap Loyalitas Wisatawan ke Destinasi Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Medan, 2020), h. 18

2) Cinderamata

Cinderamata adalah sesuatu yang dibawa oleh seorang wisatawan ke rumahnya untuk kenangan yang terkait dengan benda itu. Wisatawan bisa pula membeli cinderamata sebagai kenang-kenangan bagi orang lain.

3) Fasilitas umum di lokasi wisata

Fasilitas umum yang bermaksud adalah fasilitas penunjang tempat wisata seperti : toilet umum, tempat parkir, mushola dan sebagainya. Pembangunan fasilitas wisata didaerah tujuan wisata maupun daya tarik harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.³²

Indikator Akomodasi

Menurut Sunary, ada beberapa indikator akomodasi, yaitu :

1) Kelengkapan, kebersihan dan kerapian fasilitas

Keadaan fasilitas perusahaan yang dilengkapi oleh atribut yang menyertainya dan didukung dengan kebersihan dan kerapian saat wisatawan menggunakan fasilitas tersebut.

2) Kondisi dan fungsi fasilitas

Fasilitas yang berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan.

3) Kemudahan menggunakan fasilitas

Fasilitas yang sudah familier bagi wistawan sehingga wisatawan dapat menguankannya dengan mudah.

3. Aksesibilitas

Dalam pengembangan pariwisata sebagai sebuah sistem baik berupa perencanaan perjalanan, penyediaan informasi mengenai rute dan destinasi, keterediaan sarana transportasi, ataupun kemudahan lain untuk mencapai destinasi menjadi penentu berhasilnya peluang pengembangan destinasi. Menurut Hadiwijoyo, aksesibilitas adalah sara yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk

³² Sita Sari Ningsihh, *Pengaruh Amenitas, Atraksi Wisata, dan Aksesibilitas Terhadap Loyalitas Wisatawan ke Destinasi Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Medan, 2020), h. 22

menuju kedaerah tujuan wisata, tidak hanya menyangkut kemudahan transportasi bagi wisatawan.³³

Sedangkan menurut Sunaryo mengemukakan bahwa aksesibilitas adalah segenap fasilitas dan moda angkutan yang memungkinkan dan kemudahan serta membuat nyaman wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Menurut Ahmad, aksesibilitas adalah suatu kemudahan dalam mencapai daerah tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan, serta tersedianya sarana transportasi menuju lokasi tujuan tersebut. Sedangkan menurut Sunaryo, aksesibilitas merupakan sarana dinstruktur yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk bergerak dari daerah ke daerah lain.³⁴

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan suatu alat yang dapat memberikan kemudahan bagi seseorang yang akan melakukan perjalanan.

Aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi, seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan.

Faktor jarak sangat berpengaruh pada keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Di sini peran transportasi menjadi sangat penting dalam sistem kepariwisataan. Dikarenakan transportasi yang membawa wisatawan dari asal wisatawan menuju tujuan wisatawan.

Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat, tempat shalat (mushola), toilet atau kamar mandi untuk berwudhu, arah kiblat di kamar hotel, pelayanan saat bulan

³³Sita Sari Ningsihh, *Pengaruh Amenitas, Atraksi Wisata, dan Aksesibilitas Terhadap Loyalitas Wisatawan ke Destinasi Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Medan, 2020), h. 20

³⁴Sita Sari Ningsihh, *Pengaruh Amenitas, Atraksi Wisata, dan Aksesibilitas Terhadap Loyalitas Wisatawan ke Destinasi Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Medan, 2020), h. 21

ramadan, pencantuman label halal dan tidak halal untuk mengetahui produk yang bisa dikonsumsi oleh muslim, serta tempat rekreasi yang memisahkan antara pria dan wanita.

Faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas

Menurut Sunaryo, ada beberapa faktor utama aksesibilitas yaitu :

1) Petunjuk arah

Petunjuk arah dapat kita jumpai di tepi jalan yang berfungsi memberi petunjuk bagi pengguna jalan terhadap suatu lokasi atau tempat tertentu.

2) Terminal

Salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan.

3) Frekuensi transportasi menuju lokasi wisata

Faktor jarak dan waktu sangat mempengaruhi keinginannya orang untuk melakukan perjalanan wisata.³⁵

Indikator aksesibilitas

Adapun indikator Menurut Sunaryo, untuk aksesibilitas :

1) Kemudahan mencapai

Kemudahan mencapai ini seperti penetapan jalur dan tanda petunjuk untuk kemudahan wisatawan mencapai daya tarik wisata yang dituju.

2) Kenyamanan

Kenyamanan perjalanan untuk mencapai daya tarik wisata sangat diperlukan sekali.

3) Keamanan

Keamanan merupakan hal yang paling utama dibutuhkan wisatawan.

4) Kelancaran

³⁵Sita Sari Ningsihh, *Pengaruh Amenitas, Atraksi Wisata, dan Aksesibilitas Terhadap Loyalitas Wisatawan ke Destinasi Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Medan, 2020), h. 21

Kelancaran yang dimaksud yaitu kalancaran dalam segi angkutan transportasi maupun perjalanan.³⁶

1. Konsep wisata syariah

Destinasi wisata syariah sebenarnya tidak dapat digolongkan secara spesifik, akan tetapi untuk memenuhi standar menuju pariwisata yang syariah setidaknya terdapat fasilitas yang menunjang kebutuhan wisatawan muslim.

Menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dalam pengelolaan pariwisata, pelayanan yang santun dan ramah bagi seluruh wisatawan dan lingkungan sekitarnya. Dalam prakteknya wisata syariah memilih tempat wisata yang menjunjung tinggi kaidah syariah Islam dan ini menjadi pertimbangan utama. Setiap destinasi wisata syariah di seluruh Indonesia yang akan menjadi tujuan harus sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Karena itu, untuk mewujudkan Indonesia sebagai kiblat wisata halal dunia, maka kerjasama antara ilmuwan sebagai pemeta masalah dan membuat strategi pengembangan yang konkret dengan pemerintah dalam mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata halal di Indonesia. Seperti melakukan pembenahan infrastruktur, promosi, penyiapan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata dan menjadikan pariwisata syari'ah (halal tourism) sebagai salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata.

1) Destinasi Ramah Keluarga

Pariwisata halal harus menyediakan tujuan wisata yang ramah keluarga dan juga anak-anak. Selain itu, perlu juga memberikan keamanan secara umum bagi wisatawan muslim. Sebuah area wisata dapat dinyatakan sebagai pariwisata yang halal apabila telah memenuhi jumlah kedatangan wisatawan muslim yang cukup ramai.

³⁶Sita Sari Ningsihh, *Pengaruh Amenitas, Atraksi Wisata, dan Aksesibilitas Terhadap Loyalitas Wisatawan ke Destinasi Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Medan, 2020), h. 22

2) Layanan dan Fasilitas di Destinasi Muslim Friendly

Sebuah pariwisata halal tentu saja harus menyediakan berbagai macam restoran atau tempat makan yang memberikan pilihan makanan yang halal. Selain makanan halal, perlu juga memiliki akses ibadah yang mudah dan dalam kondisi yang bagus atau layak untuk wisatawan muslim. Tak hanya itu, fasilitas bandara dan opsi akomodasi juga harus memadai dan muslim friendly.

3) Kesadaran Halal dan Pemasaran Destinasi

Untuk poin ketiga, standar pariwisata halal harus menyediakan akses komunikasi yang mudah, begitupun dengan konektivitas transportasi udara dan persyaratan visa. Tak hanya itu, penting sekali untuk selalu memperhatikan jangkauan dan kebutuhan wisatawan muslim.

2. Pariwisata Syariah

a. Pengertian pariwisata Syariah

Pariwisata menurut *United Nation World Tourism Organization* yaitu meliputi berbagai kegiatan yang dikerjakan oleh orang yang mengadakan kunjungan dan bermukim di suatu daerah di luar area yang biasa selama waktu yang tidak lebih dari satu tahun berulang-ulang guna rekreasi, kegiatan bisnis dan tujuan lainnya.³⁷

Istilah pariwisata syariah di berbagai negara menggunakan terminologi yang berbeda-beda antara lain *Islamic tourism*, *halal tourism*, *moslem friendly travel* atau *halal tourism*. Istilah *Islamic tourism*/ *halal tourism* pertama kali di perkenalkan kepada masyarakat umum pada tahun 2000 di pertemuan yang diselenggarakan oleh OIC (*Organisation Of Islamic Cooperation*) atau OKI (Organisasi kerja sama islam). Gagasan ini sebagai alternatif dalam memenuhi permintaan dan kegiatan wisata yang dapat menyesuaikan dengan gaya hidup yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan muslim pada saat berwisata.³⁸

³⁷Basuki Antariska, *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata* (Malang Intrans Publish, 2016).

³⁸Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi* (Universitas UIN Alauddin Makassar, 2020) h.25

Definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Pariwisata syariah adalah kegiatan yang ditunjang oleh berbagai fasilitas wisata serta jasa yang disediakan oleh masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, dan pemerintah lokal yang wajib memenuhi standar atau ketentuan syariah. Secara ringkas dijelaskan bahwa pariwisata syariah sebagai kegiatan perjalanan muslim bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di luar tempat tinggal mereka yang normal. Kegiatan tersebut dilakukan jangka waktu kurang dari satu tahun.³⁹

Pariwisata halal merupakan bagian dari industri pariwisata yang konsep wisatanya ditujukan untuk pengunjung atau wisatawan muslim. Sedangkan pelayanan yang ada dalam area pariwisata tersebut harus merujuk pada konsep dan aturan dalam Islam. Konsep ini juga berlaku secara universal, artinya bukan untuk pariwisata yang ada di Indonesia saja.

1. Wisata Religi

Objek Wisata : tempat ibadah, peninggalan sejarah dan lainnya yang bernilai Islam

Tujuan Wisata : meningkatkan spiritualitas untuk ketenangan jiwa dan batiniah

Pelayanan dan Fasilitas : kuliner secara umum dan fasilitas ibadah sekadar pelengkap

2. Wisata Syariah

Objek Wisata : semua jenis wisata

Tujuan Wisata : meningkatkan spiritualitas dengan cara atau teknik menghibur untuk memenuhi kesenangan serta menumbuhkan kesadaran beragama

Pelayanan dan Fasilitas : kuliner spesifik halal dan fasilitas ibadah menjadi objek wisata

³⁹Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi* (Universitas UIN Alauddin Makassar, 2020) h.25

Pada dasarnya, konsep pariwisata halal, wisata Islam, perjalanan halal, gaya hidup halal dan lain sebagainya masih banyak perdebatan di dalamnya. Namun, berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa wisata halal lebih merujuk pada wisata religi dan syariah. Poin pentingnya adalah sesuai dengan kaidah Islam dan melibatkan orang Islam untuk turut menjaga spirit keislaman sambil melakukan perjalanan/traveling.

Tujuan utama dari konsep ini adalah memenuhi kebutuhan pokok para wisatawan muslim yang berkunjung. Berikut ini beberapa kriteria atau indikator pariwisata halal, antara lain:

1. Menyediakan restoran dengan menu makanan halal atau memberi tanda pada restoran non-halal untuk memudahkan wisatawan muslim mendapatkan makanan
2. Menyediakan fasilitas tempat ibadah dan tempat wudhu yang layak
3. Memberikan pelayanan khusus pada bulan Ramadhan, misalnya takjil dan lainnya
4. Menyediakan fasilitas rekreasi yang menjaga privasi antar gender dan tidak bercampur baur secara bebas

Konsep wisata syariah dinilai sebagai aktualisasi dari gagasan gaya hidup Islami yang mengintegrasikan dua parameter utama yaitu penerapan nilai halal dan menghindari sesuatu yang haram. Seluruh aspek atau tahapan kegiatan wisata tidak akan terlepas dari proses sertifikasi halal yang menjadi pedoman dan dikontrol oleh pemerintah. Konsep wisata syariah dimaknai sebagai kegiatan wisata berasaskan nilai ibadah dan dakwah pada wisatawan muslim serta mengagumi seluruh ciptaan-Nya dengan tetap konsisten menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Swt.⁴⁰

⁴⁰Fadhil Surur, *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi* (Universitas UIN Alauddin Makassar, 2020) h.26

Wisata syariah adalah sebagai upaya perjalanan atau rekreasi untuk mencari kebahagiaan yang tidak bertentangan dan menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam, serta sejak awal diniatkan untuk mengagumi kebesaran cipta Allah. Selain itu, perjalanan dengan tujuan tertentu juga diniatkan sebagai sebuah perjalanan syiar, setidaknya dengan melafalkan ayat-ayat suci atau bertasbih mengagumi keindahan alam sekitar, dan amalan positif lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam serta memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia dan lingkungan sekitar.⁴¹

Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata adalah tren baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai islam.

Allah Swt berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat ke 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: “Berjalanlah di (muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”⁴²

Ayat diatas menjelaskan kepada manusia untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Swt, menikmati indahnya alam nan agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk meningkatkan keimanan terhadap keesaan Allah Swt dan memotivasi memenuhi kewajiban hidup.

Definisi pariwisata syariah yaitu perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan nilai-nilai syariah Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah Swt, selama dalam perjalanannya dapat

⁴¹Hery Sucipto, Fitria Andayani, *'Potensi dan Prospek Wisata Syariah dan Tantangannya'*, (Yogyakarta :2007) h. 35.

⁴²Departemen Agama, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 398.

melakukan ibadah dengan lancar dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah.⁴³ Sedangkan wisata syariah menurut Sofyan lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), namun konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.⁴⁴

Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah kepariwisataan. Dalam Islam kita mengenal Hijrah, Haji, Ziarah, perdagangan dan mencari ilmu pengetahuan yang merupakan diantara faktor yang dijadikan alasan Islam untuk mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, teknologi, komunikasi dan transportasi, telah memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa.⁴⁵

Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemaafsadatan, tabdz ir/israf, dan kemunkaran
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.⁴⁶ Terminologi wisata syariah di beberapa negara ada yang menggunakan

⁴³ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Al-Kautsar, 2013), h. 2

⁴⁴ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republik, 2012), h. 33.

⁴⁵ Johar Arifin, *Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata* (An-Nur, 2015) h. 5-6.

⁴⁶ Pasal 1 Peraturan Menteri, *Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah* (2014)

istilah seperti *Islamic tourism*, halal tourism, halal travel, ataupun *as moslem friendly destination*. Sedangkan di Indonesia sendiri juga memiliki beberapa istilah, seperti wisata halal, wisata syariah, atau pariwisata syariah.

Wisata syariah atau wisata halal juga mempunyai beberapa definisi yang dikemukakan para ahli. Definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai Islam.⁴⁷ Komponen wisata syariah bukan hanya umat muslim yang ingin menikmati kearifan lokal.

Definisi lain tentang pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.

b. Landasan Pariwisata Syariah

Wisata syariah memiliki landasan utama yaitu Al-Qur'an dan sunnah yang menjadi sumber utama ekonomi Islam. Masalah wisata merupakan bagian dari masalah muamalah yang mengajarkan bagaimana hubungan antarmanusia dalam melakukan segala aktivitas di dalam kehidupan di dunia ini.

Selain itu, ada juga norma perundangan nasional seperti Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pariwisata UU No. 10 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁸

Tujuan berwisata bagi wisatawan pada hakikatnya antara lain adalah untuk bersenang-senang, selainjuga untuk ibadah (ghairu mahdhah). Tentu saja hal itu tergantung pada niat melakukannya. Karena itu bagaimanapun melindungi kepentingan wisatawan dalam kapasitasnya sebagai sebagai konsumen perlu

⁴⁷Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta2012), h.33.

⁴⁸Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata*(Jakarta, 2019)

dilakukan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan agamanya (dien).Selain keselamatan jiwanya (nafs), keselamatan akal nya ('aql), keberlanjutan keturunannya (nasl), dan keselamatan harta bendanya (maal).⁴⁹

c. Prinsip dan Kriteria Pariwisata Syariah

Beberapa prinsip wisata berbasis syariah mencakup :

- 1) Fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata.
- 2) Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerjasama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
- 3) Wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi suatu atraksi tersebut.⁵⁰

Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan dalam wisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya ada pada wisata religi.

Karakteristik wisata syariah dapat dilihat dari standar pengukuran dari segi administrasi dan pengelolaannya, yakni :

- 1) Pelayanan terhadap wisatawan harus sesuai dengan prinsip syariat islam secara keseluruhan.

⁴⁹Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in The Light if Maqasid Al-Shari-ah* (London: IIT, 2008), h. 5.

⁵⁰Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah : Prospek dan perkembangannya*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016) h. 92.

- 2) Staf pengelola wisata harus memiliki etika dan respek kepada wisatawan yang sesuai dengan prinsip islam.
- 3) Restaurant harus mengikuti pelayanan halal.
- 4) Mengatur semua kegiatan supaya tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam.
- 5) Membangun dengan fasilitas yang memadai dan harus sesuai dengan prinsip syariat islam.
- 6) Tersedianya tempat tempat untuk semua wisatawan muslim untuk melakukan kegiatan keagamaan (ibadah).⁵¹

Kriteria umum pariwisata syariah adalah:

- 1) Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum
- 2) Memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan
- 3) Menghindari kemusyrikan dan khurafat
- 4) Bebas dari maksiat
- 5) Menjaga keamanan dan kenyamanan
- 6) Menjaga kelestarian lingkungan
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.⁵²

Dari karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah.

- 1) Lokasi, Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- 2) Konsumsi, Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, segi kehalalan disini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.

⁵¹ Chookaew, S., chanin, O., Charatarawat, J., Spriprasert, P., & Nimpaya, S. *'Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in'* (Economics, Bussiness and Management,2015), h.741.

⁵² Riyanto Sofyan,*Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, h. 34

Wan & Awang. Muslims, in turn, follow strict rules of alimentation that are called halal. And are based on the Islamic Sharia (Shari'ah). The Koran prohibits the consumption of pork and its derivatives, of alcohol, various kinds of jellies (which are comprised from pork grease) and of products that have emulsifiers (e.g. canned goods). In addition, many Muslims abstain from consuming frozen green vegetables with dips, especially margarines, bread and pastry prepared with dried barm/ferment as well as soft drinks with caffeine all the above mentioned food is viewed as haram. That is to say, "impure", and it is, thus, illegal and prohibited.

Artinya :

Muslim, mengikuti aturan makanan yang ketat yang disebut halal. Dan berlandaskan pada Syariat Islam (Syariah). Alquran melarang konsumsi daging babi dan turunannya, alkohol, berbagai jenis jeli (yang terdiri dari lemak babi) dan produk yang mengandung pengemulsi (misalnya makanan kaleng). Selain itu, banyak umat Islam yang tidak mengkonsumsi sayuran hijau beku dengan saus, terutama margarin, roti dan kue yang dibuat dengan barm kering/fermentasi serta minuman ringan dengan kafein semua makanan yang disebutkan di atas dianggap haram. Artinya, "tidak murni", dan karenanya, ilegal dan dilarang.⁵³

Jadi, dalam wisata syariah seorang muslim wajib mengikuti aturan tentang makanan yang disebut halal dan didasarkan pada syariat Islam (syariah). Al-Qur'an melarang umat muslim mengonsumsi daging babi dan turunannya, alkohol, berbagai jenis jeli (yang terdiri dari lemak babi). Semua makanan dan minuman yang disebutkan di atas dipandang haram, artinya tidak murni dan dengan demikian dilarang (illegal).

- 3) Transportasi, Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.
- 4) Hotel, seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai. Pelayanan disini tidak terbatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam

⁵³Moira, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki, A. 'The Management Of Tourist's Alimentary Needs By The Tourism Industry', *International Journal Of Culture And Tourism Research*(2012), h. 3.

renang, ruang tamu, dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.⁵⁴

d. Ketentuan Umum Pariwisata Syariah

Dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dijelaskan mengenai pengertian wisata syariah pada bagaian pertama mengenai ketentuan umum, yaitu :

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 6) Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
- 7) Biro perjalanan wisata syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 8) Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.

⁵⁴Moira, P., Mylonopoulos, 'The Management Of Tourist's Alimentary Needs By The Tourism Industry', (*International Journal Of Culture And Tourism Research*, 2012), h. 129-140.

- 9) Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 10) Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar didalam suatu ruangan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan liburan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.
- 11) Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan atau klarifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan.
- 12) Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna atau massage.⁵⁵

Berdasarkan penjabaran diatas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua prespektif yaitu prespektif agama dan prespektif industri. Dalam fatwa secara eksplisit juga dijelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian hotel, para wisatawan, destinasi wisata, dan sebagainya. Pada bagain ketiga dijelaskan bahwa penyelenggaraan wisata wajib memenuhi perinsip-prinsip.

- 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir/israf, dan kemungkaran.
- 2) Menciptakan kemashalatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.⁵⁶

Ketentuan hotel syariah ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut:

- 3) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila

⁵⁵Dewan Syariah Nasional Mui, Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Pariwisata Prinsip Syariah*.

⁵⁶ Dewan Syariah Nasinal Mui, Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/2016 *Tentang Pedoman Penyelenggara Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*

- 4) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila
- 5) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI
- 6) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci
- 7) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
- 8) Hotel syariah wajib memiliki pedomanan dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
- 9) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pariwisata syariah memiliki standar kriteria sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
3. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, porniaksi, minuman keras, narkoba dan judi
4. Menghindari kemusyrikan dan khorofat
5. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersikap hedonis dan asusila
6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan
7. Bersifat universal dan inklusif;
8. Menjaga kelestarian lingkungan
9. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan.

Adanya nilai-nilai Islam yang melekat tersebut menjadikan para wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata di samping memperoleh kesenangan yang bersifat

duniawi, juga mendapatkan kesenangan yang sejalan dengan nilai-nilai yang selaras secara dan seiring dengan tujuan dijalankannya syari'ah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan terhadap keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.

Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh kegiatan wisata. Pokok dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah disegala aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.

Beberapa prinsip pengembangan wisata berbasis syariah mencakup:

1. Pengembangan fasilitas wisata berbasis syariah dalam skala besar atau kecil beserta pelayanan di luar dan di dalam atau dekat lokasi wisata.
2. Fasilitas dan pelayanan berbasis syariah tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh masyarakat setempat, yang dilakukan dengan bekerjasama atau dilakukan secara individual oleh yang memiliki.
3. Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau sifat atraksi berbasis syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru Sebagai Destinasi Wisata Syariah”. Dengan adanya kerangka konseptual akan

didapatkan kejelasan dalam penelitian ini, sehingga peneliti sekiranya perlu mengemukakan beberapa istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Peluang Desa Nepo

Desa Nepo merupakan desa yang memiliki berjuta keindahan alam didalamnya. Desa Nepo merupakan kampung Habibie kecil yang ditandai dengan adanya masjid yang dibangun pada masa Habibie. Selain dijuluki kampung Habibie kecil, Desa Nepo juga dijuluki dengan nama Bumi Nepo. Yang dimaksud dengan peluang desa Nepo dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang dimiliki desa Nepo untuk menjadikan sebagai wisata syariah yang menekankan pada atraksi, akomodasi, dan aksesibilitas.

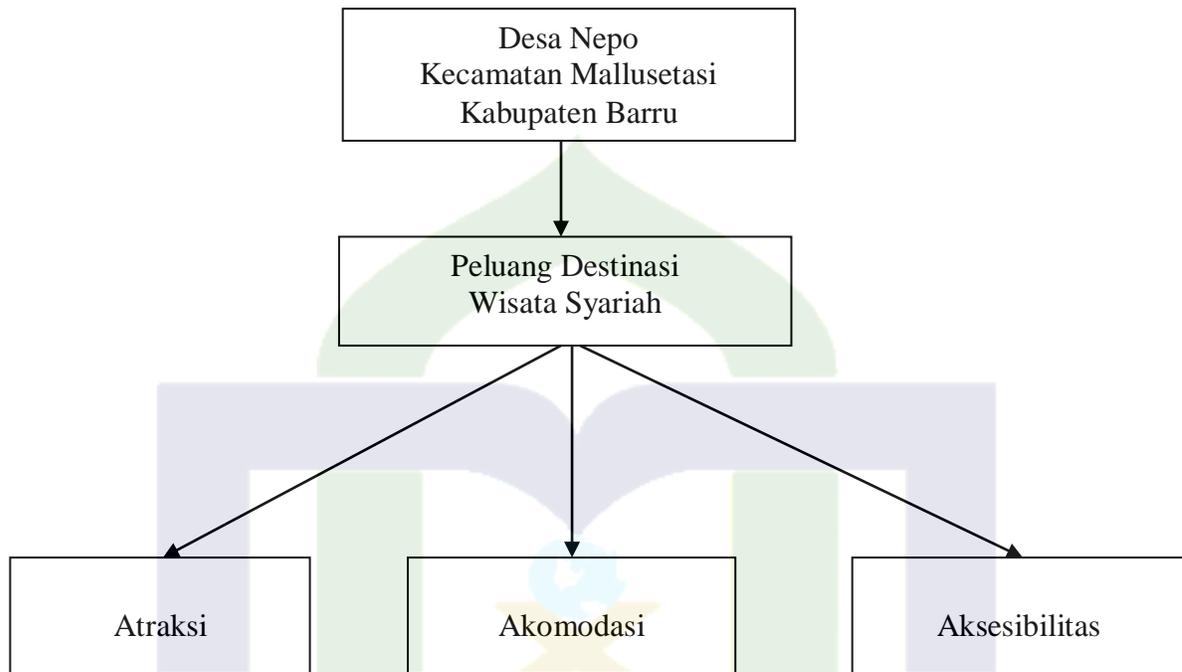
2. Destinasi Wisata Syariah

Destinasi wisata syariah adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Destinasi wisata syariah mencakup fasilitas umum dengan standar syariah, aksesibilitas, akomodasi serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya pariwisata syariah. Dalam penelitian ini, salah satu yang dapat menjadikan Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah contohnya Masjid Nur Habibie yang terkenal merupakan objek utama wisatawan mancanegara datang ke Desa Nepo. Yang dimaksud destinasi wisata syariah dalam penelitian ini adalah tempat berwisata yang sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma agama islam di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran digunakan sebagai seperangkat konsep definisi yang saling berhubungan dan mencerminkan suatu pandangan yang sistematis mengenai fenomena. Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

Dengan konteks penelitian diatas, maka penelitian menggambarkan kerangka pikir penelitian “Menakar Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi wisata Syariah”.



Bagan 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah yang diterbitkan IAIN Pare Pare. Bagian ini menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.⁵⁷

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghanpiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang masalah-masalah sosial dan bukan mendeskripsikan sebagian permukaan dari suatu realitas.⁵⁹ Serta menurut Denzim dan Lincion bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.⁶⁰

Melihat dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terkait masalah yang diteliti secara keseluruhan dan melibatkan beberapa metode dalam proses penelitiannya. Peneliti menggunakan

⁵⁷Tim penyusun, "*penulisan karya ilmiah berbasis teknologi informasi*", (Parepare, IAIN ParePare Nusantara 2020) h. 48

⁵⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), h. 42.

⁵⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta, Bumi Aksara, 2015), h. 85.

⁶⁰Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabeta, 2017), h. 24.

pendekatan penelitian kualitatif agar dapat memahami fenomena yang menjadi subjek penelitian dan memaparkan informasi dari hasil pengolahan datanya dalam bentuk deskriptif.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan sistematis menggunakan data-data yang diperoleh di lapangan.⁶¹Data-data yang diangkat merupakan data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis akan turun langsung di lapangan untuk mendapatkan data agar tujuan penulis dapat terlaksana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peneliti menetapkan lokasi di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sebagai lokasi penelitian, karena alasannya dianggap penting dalam menemukan data-data terkait potensi Desa Nepo sebagai Desa Wisata Syariah. Waktu penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 1 bulan dan disesuaikan pada kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus ditetapkan pada awal penelitian karena fokus penelitian ini berfungsi untuk memberikan suatu batasan atas hal-hal yang akan diteliti nantinya. Fokus penelitian ini bermanfaat dalam arah selama dalam proses peneliti, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan tujuan dari pada peneliti ini. Pada fokus ini akan selalu dilakukan perbaikan selama proses penelitian dan bahkan akan memungkinkan untuk dilakukannya perubahan pada saat berada di lapangan.

Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, hal yang dianggap sangat penting dan reabilitas masalah yang akan

⁶¹Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), h. 58.

dipecahkan. Maka dari itu penelitian akan difokuskan pada hal meliputi peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah, penunjang, hambatan Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah.

Adapun fokus penelitian ini yaitu penelitian difokuskan pada sejauh mana Desa Nepo menjadi Destinasi Wisata Syariah pada aspek atraksi, akomodasi dan aksesibilitas.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang ada dalam penelitian ini terdiri atas data subjek dan data dokumentasi. Data subjek merupakan suatu jenis data yang dihasilkan dari pendapat, sikap, dan pengalaman. Dari subjek penelitian yaitu respon baik secara individu maupun berkelompok. Data dokumenter merupakan yang didapatkan melalui jurnal, buku, majalah dan artikel publikasi.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informan secara langsung tanpa melalui perantara yang mana data tersebut dapat didapatkan dari hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang/pihak lain atau data yang tidak diperoleh secara langsung. Data sekunder merupakan sumber data yang kedua yang menjadi penguat/pendukung dari data primer. Sumber data pendukung berupa buku-buku yang berkaitan dengan kepustakaan, artikel, skripsi, karya ilmiah atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder pada penelitian ini dapat didapatkan melalui jurnal yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data yang dilakukan langsung di lokasi atau lapangan yang diamati. Menurut Zainal Arifin dalam buku Kristanto, metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI), observasi merupakan proses pendataan data dengan tahap pengamatan yang kemudian dilakukan pencatatan secara terarah, masuk akal, logis (objektif) terhadap berbagai fenomena yang terjadi maupun situasi yang dibuat. Dalam hal ini, peneliti terjun langsung di lokasi mengamati masalah yang berkaitan dengan peluang Desa Nepo sebagai destinasi wisata syariah dari aspek atraksi, akomodasi dan aksesibilitas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu interaksi dan proses berdialog dan berdiskusi dengan tujuan untuk mendapatkan data yang dimaksud dan data yang dibutuhkan. Peneliti hendaknya melakukan wawancara terhadap informan yang mengetahui data yang dibutuhkan dengan melampirkan dan memberikan beberapa daftar pertanyaan sebelum kegiatan wawancara itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang valid.

Dalam wawancara informan yang hendak diwawancarai adalah orang yang benar-benar terlibat langsung dalam fenomena, informan yang mengetahui informasi administrasi, informan yang memiliki bidang keahlian, serta orang-orang yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pariwisata. Mengenai hal ini nantinya akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada pelaku usaha atau pengusaha di bidang pengelola pariwisata. Adapun yang akan menjadi narasumber dalam wawancara ini yakni Pemerintah Desa Nepo, pengelola destinasi wisata dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembangunan Desa Nepo.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan pengumpulan dan atau mencatat data-data yang telah ada sebelumnya berupa dokumen-dokumen. Teknik pengumpulan data studi dokumentasi merupakan sumber data yang bersifat sekunder yang melengkapi sumber data primer yaitu wawancara dan observasi. Dalam hal ini, dokumen yang dikumpulkan berupa arsip ataupun

catatan yang berkaitan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) dan dokumen pengelola tempat wisata.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif⁶² meliputi:

1. Uji Credibility

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

2. Uji Konfirmability

Penelitian kualitatif dikenal pengujian *Konfirmability* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memeriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interviu serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau di dapatkan dari lapangan.⁶³ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum

⁶²Helauddin & Hengki Wijaya, “*Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*”, (Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

⁶³Sudarman Damin, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 209.

mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam tehnik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian data

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Kesimpulan

kesimpulan adalah kegiatan analisis yang paling akhir yang dikhususkan pada penafsiran data yang telah disajikan.⁶⁴ Pengumpulan data pada tahap awal menghasilkan kesimpulan sementara yang masih memerlukan verifikasi yang dapat menguatkan kesimpulan atau bahkan dapat menghasilkan kesimpulan baru, kesimpulan ini dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, kesimpulan dapat berkembang sewaktu-waktu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

⁶⁴Imron Rosidi, *Karya Tulis Ilmiah*, (Surabaya, PT. Alfina Primatama, 2011), h. 26.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah Pada Aspek Atraksi

Pariwisata syariah dalam perspektif masyarakat pada umumnya berupa wisata ziarah, makam ulama, mesjid-mesjid, peninggalan-peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Sebenarnya pariwisata syariah bukan hanya wisata ziarah melainkan pariwisata dalam trend baru pariwisata dunia yang dapat berupa wisata alam, wisata budaya, maupun wisata buatan yang keseluruhannya dibingkai dalam nilai-nilai islam.

Konsep wisata syariah dinilai sebagai aktualisasi dari gagasan gaya hidup Islami yang mengintegrasikan dua parameter utama yaitu penerapan nilai halal dan menghindari sesuatu yang haram. Seluruh aspek atau tahapan kegiatan wisata tidak akan terlepas dari proses sertifikasi halal yang menjadi pedoman dan dikontrol oleh pemerintah. Konsep wisata syariah dimaknai sebagai kegiatan wisata berasaskan nilai ibadah dan dakwah pada wisatawan muslim serta mengagumi seluruh ciptaan-Nya dengan tetap konsisten menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan yang ditetapkan oleh Allah Swt.⁶⁵

Atraksi adalah suatu hal yang bisa dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di setiap destinasi dan objek wisata. bisa berupa keindahan alam, budaya masyarakat setempat, bangunan bersejarah, serta atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan ini harus unik dan berbeda. Atraksi dalam pariwisata atau biasa dikenal dengan istilah daya tarik wisata merupakan fokus utama penggerak pariwisata pada sebuah destinasi wisata. Berdasarkan UU No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan disebut dengan daya tarik wisata atau

⁶⁵Fadhil Surur, *Wisata Halal, Konsep dan Aplikasi*, (Kabupaten Gowa : Alauddin University Press : 2020)". h.26.

dikenal dengan istilah *tourist attraction*. Atraksi wisata didasarkan atas sumber alam, budaya, etnis dan hiburan.

Atraksi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang permanen dalam tujuan dalam tujuan wisata. Atraksi ditujukan kepada pengunjung dengan tujuan utama untuk memberikan hiburan, bersenang-senang, pendidikan dan menyaksikan sesuatu yang menarik. Bisa juga ditambahkan interpretasi objek wisata yang dimasukan unsur nilai-nilai islam sebagai pengingat dan renungan bagi wisatawan muslim. Paling penting tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.

Peluang Desa Nepo menjadi desa wisata syariah merupakan suatu potensi besar untuk dilakukan, namun tanpa keniscayaan bahwa menjadikan wisata Desa Nepo menjadi wisata berbasis syariah tidak terbentuk begitu saja akan tetapi banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk atraksi apa yang harus dilakukan oleh wisatawan dan intraksi syariah apa yang akan dinikmati oleh wisatawan sehingga mendapatkan pengalaman berwisata yang berkualitas.

Objek dalam pariwisata halal dapat berupakunjungan wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata suaka alam (taman nasional), ekopariwisata dan wisata buatan yang diinterpretasikan sesuai dengan kaidah- kaidah Islam.

1) *Natural Attractions* (daya tarik alam)

Atraksi ini biasa dikenal sebagai daya tarik alam seperti pemandangan, pemandangan laut, danau, air terjun, kebun raya, agrowisata, gunung berapi, termasuk kelompok fauna dan flora (kebun binatang).

Destinasi wisata Desa Nepo terdapat beberapa opsi pilihan untuk dapat dikunjungi seperti atraksi masjid Nur Habibie yang menjadi tempat kunjungan atraksi religius yang hendak dilakukan oleh wisatawan, bendungan Lanrae atau biasa dikenal dengan istilah Tempat mandi Habibie kecil juga menjadi salah satu atraksi wisata populer di Desa Nepo.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengelola Desa Wisata dengan nama Darman :

“Memang ada beberapa objek wisata yang menjanjikan dan patut dikelola menjadi Desa wisata yang ada di desa nepo diantaranya Bujung Mattimboe, Goa Bola Batue, Danau Pakue yang terletak diatas bukit, Masjid Nur Habibie, Bendungan, Wae Tuoe biasa disebut Bujung Pulawenggi dan masih ada beberapa spot wisata yang belum sempat kami kelola dan rencananya akan dikelola sebagai mana mestinya.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas banyak potensi yang mendukung Desa Nepo menjadi Desa Wisata Syariah. Aspek yang mendasar belakangi desa Nepo menjadi Desa wisata dikarenakan Desa Nepo memiliki beberapa destinasi wisata yang mampu menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga terpilih menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Barru.

2) *Build Attracions* (daya tarik buatan)

Daya tarik buatan berupa bangunan dengan arsitek yang menarik, rumah adat, bangunan modern, Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengelola masyarakat dengan nama Ilham :

”Ketik berbicara mengenai atraksi tentu kita tau sendiri bahawa di Desa Nepo daya tarik alaam yang di tawarkan seperti pemandangan pengunungan dan sawahh yang bagus, air terjun, danau. Begitu juga untuk daya tarik buatan dan budaya tentu tidak jauh dengan Desa Nepo disuguhkan dengan rumah adat, bagunan bersejarah sampai kuburan adat arung dari pahlawan Nepo. Atraksi budaya yang ditawarkan juga sangat menarik seperti kesenian kesenian, acara adat tahunan, pesta panen, turun sawah dan itu semua yang membuat wisatawan datang berkunjung di sini, namun melihat dari sisi atraksi yang dikaitkan dengan wisata syariah perlu menekankan bahwa bisa saja wisata syariah di adakan tetapi tidak terlalu menekan karena itu juga akan menjadi faktor utama pengunjung untuk datang.”⁶⁷

Berdasarkan wawancara tersebut, banyak peluang dari segi atraksi yang dapat menjadikan Desa Nepo sebagai Destinasi Wisata Syariah tetapi tidak terlalu

⁶⁶Darman, Pengelola Desa Wisata Nepo, wawancara penulis di Dusun Mareppang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

⁶⁷Ilham, Masyarakat Desa Wisata Nepo, wawancara penulis di Dusun Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

mendasar pada konsep syariah dikarenakan akan berpengaruh pada pengunjung dan wisatawan yang akan berkunjung.

Tempat tersebut harus ada objek dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki daerah lain. Hal tersebut berarti bahwa daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya sebagai hiburan. Tempat wisata tersebut disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan untuk tinggal lebih lama. Daerah tujuan wisata harus memiliki fasilitas untuk berbelanja (menyediakan oleh-oleh) sebagai hal yang dibawa pulang ke tempat asal. Kemudahan aksesibilitas untuk menunjang daya tarik wisata, seperti kendaraan yang digunakan dan berapa lama untuk tiba di tempat tujuan. Daerah tujuan wisata terdapat tempat untuk wisatawan tinggal selama berlibur.

Destinasi adalah tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan seseorang dibandingkan dengan tempat lain yang dilalui selama perjalanan (misalnya daerah transit).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengelola Desa Wisata dengan nama Bahrul Ulum :

“Untuk atraksi di Desa Nepo sudah disiapkan seperti Jeka’ (engrang), Magasing, Mapadendang, dan beberapa atraksi lainnya.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam aspek atraksi, pengelola Desa Wisata Nepo telah berupaya mengembangkan desa wisata dengan melestarikan budaya lokal yang sudah hampir mati di era milenial yang semakin melemahnya nilai-nilai tradisional di Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengelola Desa Wisata dengan nama Muhammad Toaha :

“sebagai salah satu desa wisata tentunya harus menarik baik pada spot wisata maupun cerita mengenai Nepo itu sendiri termasuk dengan Nepo sebagai Habibie kecil yang dimana Pak Habibie pernah tinggal di Desa Nepo, dan

⁶⁸Bahrul Ulum, Pengelola Desa Wisata Nepo, wawancara penulis di Dusun Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

bnayak hal di Desa Nepo dimana pemandangannya cukup indah dan beberapa spot wisata seperti air terjun, danau pakue, mattimboe dan sungai mattimboe.”⁶⁹

Berdasarkan wawancara diatas dalam aspek atraksi, banyak spot yang menjadi daya tarik utama pengunjung datang ke Desa Nepo untuk berwisata dikarenakan Desa Nepo terkenal dengan julukan kampung Habibie Kecil.

Pada dasarnya destinasi wisata akan berkembang apabila disenangi banyak wisatawan/pengunjung, besar kecilnya wisatawan sangat menentukan perkembangan daerah wisata itu sendiri juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata. Atraksi dalam dunia wisata juga merupakan hal yang paling penting dalam peningkatan jumlah pengunjung karena atraksi menjadi daya tarik utama sehingga pengunjung penasaran dengan destinasi tersebut.

3) *Cultural Attractions* (atraksi budaya)

Atraksi ini berupa atraksi budaya, kesenian, museum, upacara keagamaan, festival kesenian, dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Nepo dengan nama Mamma Husain :

“Desa Nepo menjadi salah satu desa yang terpilih menjadi Desa Wisata yang dimana tidak luput dari Presien ke-3 BJ.Habibie yang mendapat julukan sebagai kampung Habibie kecil, hal utama yang paling menjadi daya tarik utama wisatawan mancanegara datang yaitu masjid penggilan BJ. Habibie dan bendungan tempat mandi BJ. Habibie, memang ada visi misi pengembangan desa wisata. Nah ini nanti yang akan menjadi pertimbangan pengembangan desa wisata syariah.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam aspek atraksi, Desa Nepo dapat dikembangkan menjadi desa wisata syariah yang menjadi pertimbangan yang akan di ajukan ke Dinas Pariwisata.

Pengembangan wisata berbasis syariah didasarkan pada salah satu sifat budaya tradisional yang lekat pada suatu lingkungan religius atau sifat atraksi berbasis

⁶⁹Muhammad Toaha, Pengelola Desa Wisata Nepo, wawancara penulis di Dusun Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

⁷⁰Mamma Husain, Kepala Desa Nepo, wawancara penulis di Dusun Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

syariah yang dekat dengan alam dimana pengembangan lingkungan sebagai pusat pelayanan berbasis syariah bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut. Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh kegiatan wisata. Pokok dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah disegala aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.

Desa Nepo bermula dikenal orang-orang sekitar di karenakan Desa ini merupakan kampung Habibie kecil kemudian disebarakan di sosial media bahkan di televisi, radio dan koran sehingga banyak yang penasaran datang ke Desa Nepo. Bahkan semasa hidup Presiden Ke-3 RI Bapak Prof. Habibie sempat berkunjung ke Desa Nepo. Pengunjung yang datang tidak hanya wisatawan lokal tetapi juga mancanegara. Banyak wisatawan dari berbagai negara contohnya Jerman telah berkunjung ke Desa Nepo.

Desa Nepo dikenal dengan keindahan alam yang luar biasa, dikelilingi dengan rerumputan dan pepohonan yang hijau. Dapat dilihat terdapat banyak potensi yang dimiliki, bila dikelola dengan profesional dan dirawat dengan baik akan mendatangkan keuntungan besar dan bermanfaat dalam menjadi wisata yang berkelanjutan. Terwujudnya destinasi pariwisata melalui pengembangan potensi pesona alam yang beraneka ragam, berupa wisata alam, lingkungan mendukung, dan tumbuhan-tumbuhan yang di lestarikan.

Konsep dari Destinasi Wisata Syariah sendiri memiliki konsep wisata alam yang dipadukan dengan wisata religi, dengan lingkungan yang luas sehingga pengunjung dapat membuat kegiatan-kegiatan besar di Desa ini. Desa Nepo belum dikenal sebagai wisata syariah atau wisata dengan konsep islami. Tetapi memiliki peluang dijadikan sebagai wisata syariah dari aspek atraksi dengan melakukan pengembangan berupa pembangunan museum masjid Habibie dari Habibie Center serta melihat dari sejarah-sejarah wisata religi di Desa Nepo.

B. Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah Pada Aspek

Akomodasi

Peluang Desa Nepo menjadi desa wisata syariah merupakan suatu potensi yang perlu dilakukan terutama dalam aspek akomodasi. Salah satu tantangan dalam pengembangan desa wisata syariah adalah bagaimana melayani wisatawan non-muslim dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa berbenturan dengan konsep wisata halal. Seperti dalam aspek akomodasi, hotel, *home stay* harus mempersiapkan fasilitas yang layak untuk bersuci, suasana yang aman, nyaman, kondusif untuk pengunjung serta kebersihan sanitasi dan lingkungan sekitar.

Wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata membutuhkan fasilitas yang menunjang untuk mempengaruhi kebutuhan perjalanan tersebut. Komponen fasilitas dan pelayanan (amenitas) biasanya terdiri dari unsur alat transportasi, fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan minum dan fasilitas penunjang lainnya bersifat spesifik dan disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan.

Faktor akomodasi juga menjadi pertimbangan wisatawan ketika membuat keputusan untuk berkunjung di suatu lokasi wisata karena akomodasi berkaitan dengan ketersediaan akan tempat. Akomodasi dapat berupa tempat penginapan, beristirahat, makan, minum, dan mandi. Akomodasi biasanya disediakan oleh agen travel dan di pilihkan yang lokasinya berdekatan dengan destinasi wisata yang uga biayana sesuai dengan tarif pembayaran.

1) Kelengkapan, kebersihan dan kerapian fasilitas

Keadaan fasilitas perusahaan yang dilengkapi oleh atribut yang menyertainyaa dan didukung dengan kebersihannya dan kerapian saat wisatawan menggunakan fasilitas.

Akomodasi menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai agar wisatawan merasa nyaman dan aman ketika berda di lokasi tersebut. Akomodasi yang dimaksud dalam pariwisata seperti hotel, *home stay*, *villa*, rumah makan, gedung pertunjukan dan sebagainya.

Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan dalam wisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya ada pada wisata religi.

Pemanfaatan fasilitas yang sudah ada lebih diutamakan. Rumah penduduk dapat dimanfaatkan sebagai sarana akomodasi atau *home stay* bagi wisatawan yang ingin bermalam, warung-warung setempat masih tetap dapat dimanfaatkan layak dan nyaman digunakan sebagai fasilitas kepariwisataan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Pemerintah Desa Wisata dengan nama Mamma Husain :

“Fasilitas yang kami buat dalam bidang akomodasi di sini dalam bentuk *home stay*, kami sudah merancang dan sekarang sementara proses pembangunan *home stay*. Kemudian hotel dan penginapan ini merupakan perencanaan jangka panjang yang sudah dibahas tetapi belum di masukan ke dalam RKPD Des.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatassalah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wisata berkelanjutan yaitu adanya tempat wisatawan beristirahat dengan fasilitas yang baik pula seperti *home stay*. Dengan adanya *home stay* akan mendorong wisatawan untuk berkunjung dan menikmati objek dan daya tarik serta mempelajari budaya setempat di daerah wisata dengan waktu yang relatif lama.

Pengadaan *home stay* dalam sebuah wisata tidak memiliki manajemen resmi selayaknya hotel. Pemilik harus tetap mengedepankan kenyamanan dan kultur budaya serta fasilitas yang memadai seperti tempat tidur, televisi, kipas angin atau AC. *Home stay* juga tidak perlu memiliki bangunan tersendiri untuk di jadikan tempat wisatawan tetapi dengan menjadikan rumah warga yang memiliki fasilitas memadai sebagai *home stay*.

⁷¹Mamma Husain, Pemerintah Desa Nepo, wawancara penulis di Dusun Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Masyarakat Lokal Desa Wisata dengan nama Ilham :

“salah satu hal bentuk antusias masyarakat dalam desa wisata yaitu dengan mempersiapkan *home stay*, *spot-spot* andalan yang ada di desa wisata, menciptakan aktivitas-aktivitas yang bisa jadikan tontonan wisatawan datang berkunjung, dengan adanya pengadaan akomodasi ini juga dapat menambah peningkatan ekonomi masyarakat khususnya Desa Nepo”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas masyarakat turut antusias dalam pengadaan akomodasi dengan memperhatikan pada kebiasaan-kebiasaan budaya yang mampu menarik perhatian wisatawan.

2) Kondisi dan fungsi fasilitas

Fasilitas yang berfungsi dengan baik dan tidak mengalami kerusakan dapat membuat kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung agar merasakan nuansa yang lebih bagus serta tidak bosan di tempat wisata tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Pengelola wisata Desa Nepo dengan nama Muhammad Toaha :

“kami selaku pengelola sudah berusaha mempersiapkan fasilitas seperti pengadaan *home stay*, *villa*, gasebo, toilet yang nantinya pengunjung bisa merasa nyaman berada di lokasi penelitian tersebut, namun ada beberapa kendala diantaranya bisnis pariwisata yang dimana budaya masyarakat termasuk pengunjung belum terlalu sadar membayar kontribusi, kendala lain adalah pemerintah kabupaten maupun pemerintah kementerian belum bersinergi untuk memberikan pengembangan sentuhan untuk memberikan potensi wisata yang masih banyak hal perlu dikerjakan oleh para penanggung jawab untuk masing-masing wisata di Desa Nepo”⁷³

Dari hasil wawancara diatas, Desa Nepo sudah memiliki fasilitas yang memadai dari aspek akomodasi sehingga memiliki peluang di jadikan sebagai destinasi wisata syariah tetapi masih memiliki kendala.

⁷²Ilham, Masyarakat Desa Nepo, wawancara penulis di Dusun Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

⁷³Muhammad Toaha, Pengelola Desa Wisata Nepo, wawancara penulis di Dusun Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

Dampak positif dari pengadaan home stay juga dapat menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Penghasilan itu di dapatkan dari transaksi antara wisatawan dan tuan rumah dalam bentuk penempatan home stay oleh wisatawan. Dampak lainnya juga berpengaruh pada terbukanya peluang investasi bagi masyarakat.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi akomodasi yang mempengaruhi akomodasi diantaranya, Tempat makan dan minum yang tentu saja dalam melakukan makan dan minum sehingga perlu disediakan pelayanan makan dan minum sehingga perlu disediakan pelayanan makanan dan minuman. Hal tersebut mengantisipasi bagi para wisatawan yang tidak membawa bekal saat melakukan perjalanan wisata. Kemudian cinderamata, Cinderamata adalah sesuatu yang dibawa oleh seorang wisatawan ke rumahnya untuk kenangan yang terkait dengan benda itu. Wisatawan bisa pula membeli cinderamata sebagai kenang-kenangan bagi orang lain. Kemudian fasilitas umum di lokasi wisata, fasilitas umum yang bermaksud adalah fasilitas penunjang tempat wisata seperti : toilet umum, tempat parkir, mushola dan sebagainya. Pembangunan fasilitas wisata di daerah tujuan wisata maupun daya tarik harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan.

3) Kemudahan menggunakan fasilitas

Fasilitas yang sudah familier bagi wisatawan sehingga dapat mengguankannya dengan mudah. Fasilitas ini juga nantinya menjadi penunjang bagi wisatawan dan khususnya bagi pengelola agar tidak kesulitan ketika ada kendala.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Nepo dengan nama Mamma Husain :

“Kami selaku pemerintah desa sudah menyiapkan fasilitas yang dikelola oleh pengelola Desa Wisata dan bumdes seperti pengadaan *home stay*, *villa*. Dimana kemudian nantinya akan memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk pengunjung.”⁷⁴

⁷⁴Mamma Husain, Kepala Desa Wisata Nepo, wawancara penulis di Dusun Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara, ditinjau dari aspek akomodasi Desa Nepo memiliki peluang melihat dari fasilitas yang ditawarkan di Ddesa Wisata tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Pengelola Wisata Desa Nepo dengan nama Darman :

“Rencana kami kedepannya kami bbetul-betul seriuskan untuk memfokuskan pada aspek atraksi, akomodasi dan akses jalannya. Kita juga membentuk kolaborasi dengan masyarakat bilamana ada yang mau menjadikan rumah tempat huniannya sebagai tempat beristirahat untuk para wisatawan, kami juga berencana mengembangkan dengan membangun tempat yang juga menjadi tanggung jawab dengan menjaga lingkungan karena kebersihan juga perlu dalam hal pengembangan desa wisata, hal yang perlu di lihat juga dengan memperbaiki dan menjaga fasilitas yang sudah disiapkan dari Pemerintah Desa Nepo sehingga bisa digunakan berkepanjangan.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara, ditinjau dari aspek akomodasi pengelola Desa Nepo dalam pengembangannya perlu ditingkatkan.

Konsep dari Destinasi Wisata Syariah sendiri memiliki peluang dalam hal destinasi wisata syariah dalam aspek akomodasi yang tentu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan yang berkunjung. Kehidupan masyarakat sehari-hari akan menjadi bagian yang sangat menarik untuk diikutsertakan sebagai daya tarik wisata.

C. Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah Pada Aspek

Aksesibilitas

Salah satu potensi yang mampu menjadi tujuan mengunjungi dengan melihat dari akses jalan yang memadai. Aksesibilitas dalam sebuah desa wisata sangat penting untuk mempermudah wisatawan yang datang berkunjung menggunakan berbagai macam alat transportasi darat. Prasarana akses jalan sangat mempengaruhi jumlah arus pengunjung yang datang.

Aksesibilitas adalah seran dan infrastruktur untuk menuju destinasi, seperti jalan raya, ketersediaan sarana transportasi dan rambu-rambu penunjuk jalan.

⁷⁵Darman, Pengelola Desa Wisata Nepo, wawancara penulis di Dusun Mareppang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

Faktor jarak sangat berpengaruh pada keinginan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata. Di sini peran transportasi menjadi sangat penting dalam sistem kepariwisataan. Di karenakan transportasilah yang membawa wisatawan dari asal wisatawan menuju tujuan wisatawan.

1) Kemudahan mencapai

Kemudahan mencapai ini seperti penetapan jalur dan tanda petunjuk untuk kemudahan wisatawan mencapai daya tarik wisata yang dituju. Gunanya agar wisatawan atau pengunjung juga dapat dengan mudah mendapat lokasi yang ingin dikunjungi.

Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat, tempat shalat (mushola), toilet atau kamar mandi untuk berwudhu, arah kiblat di kamar hotel, pelayanan saat bulan ramadan, pencantuman label halal dan tidak halal untuk mengetahui produk yang bisa dikonsumsi oleh muslim, serta tempat rekreasi yang memisahkan antara pria dan wanita.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Pemerintah Desa Wisata dengan nama Mamma Husain :

“Aksesibilitas ini merupakan kendala utama kita di Desa Nepo dikarenakan jalanan utama yang selalu kita lalui kurang baik sehingga ini menjadi perhatian utama kita selaku pemerintah desa untuk melakukan perbaikan jalan, kemudian kendala kedua putusnya jembatan penghubung menuju destinasi wisata Dusun Lanrae dan Watan Nepo.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas ada beberapa kendala yang mendasari Desa Nepo yang perlu di benahi kedepannya diantaranya akses jalan di Desa Nepo tidak memadai sehingga memerlukan perhatian khusus. Ini dikarenakan Desa Nepo merupakan jalan utama penghubung antar Desa sehingga mobil tambang yang lewat

⁷⁶Mamma Husain, Pemerintah Desa Nepo, wawancara penulis di Dusun Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

dari desa tetangga merusak jalanan di Desa Nepo, akibat dari tambang tersebut juga membuat kerusakan yang cukup parah karena telah memutus jembatan penghubung Dusun Lanrae dan Watang Nepo. Ini menjadi perhatian utama dan perlu dilakukan perbaikan dengan mengingat Desa Nepo yang merupakan desa wisata.

2) Keamanan dan kenyamanan

Keamanan dan kenyamanan perjalanan untuk mencapai daya tarik wisata sangat diperlukan sekali. Salah satu faktor utama yang menjadikan setiap destinasi wisata semakin banyak pengunjung yaitu akses jalan yang aman dan nyaman saat mengunjungi lokasi tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat Desa Wisata dengan nama Darman:

“Untuk akses jalan, kami adalah pengelola wisata alam tentu butuh nyala untuk bisa sampai ke lokasi tersebut, tentunya kami akan pikirkan kedepannya untuk akses jalan menuju lokasi tersebut agar bisa dijangkau dengan roda dua umumnya. Tetapi tidak bisa membedakan antara transportasi perempuan dan laki-laki karena akses terjal tidak memungkinkan perempuan mengendarai kendaraan samapi ke lokasi tersebut.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas pengelola desa wisata telah memiliki rencana untuk akses menuju lokasi wisata yang dituju yang hanya bisa diakses dengan kendaraan roda dua.

Peluang Desa Nepo menjadi desa wisata syariah merupakan suatu potensi besar untuk dilakukan, namun tanpa keniscayaan bahwa menjadikan wisata Desa Nepo menjadi wisata berbasis syariah tidak terbentuk begitu saja akan tetapi banyak hal yang perlu diperhatikan termasuk atraksi apa yang harus dilakukan oleh wisatawan dan intraksi syariah apa yang akan dinikmati oleh wisatawan sehingga mendapatkan pengalaman berwisata yang berkualitas. Destinasi wisata Desa Nepo terdapat beberapa opsi pilihan untuk dapat dikunjungi seperti antraksi masjid Nur Habibie yang menjadi tempat kunjungan antraksi religius yang hendak dilakukan oleh

⁷⁷Darman, Pengelola Wisata Desa Nepo, wawancara penulis di Dusun Mareppang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

wisatawan, bendungan Lanrae atau biasa dikenal dengan istilah Tempat mandi Habibie kecil juga menjadi salah satu atraksi wisata populer di Desa Nepo.

Akses jalan tidak hanya harus bagus tetapi perlu adanya perbaikan untuk pembangunan berkelanjutan. Selain aksesibilitas berupa jalanan, desa wisata juga memerlukan papan informasi mengenai hal-hal yang berlaku di desa wisata. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat, tempat shalat (mushola), toilet atau kamar mandi untuk berwudhu, arah kiblat di kamar hotel, pelayanan saat bulan ramadan, pencantuman label halal dan tidak halal untuk mengetahui produk yang bisa dikonsumsi oleh muslim, serta tempat rekreasi yang memisahkan antara pria dan wanita.

3) Kelancaran

Kelancaran yang dimaksud yaitu kelancaran dalam segi angkutan transportasi maupun perjalanan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Pemerintah Desa Wisata dengan nama Ilham :

“Pertama, penataan lingkungan belum tertata kemudian akses jalan juga tidak terlalu memadai untuk menerapkan konsep sapta pesona karena pertama, hewan ternak seperti sapi masyarakat masih berkeliaran bebas sehingga kotoran hewan ini bisa mengurangi keindahan dari Desa Nepo itu sendiri. Kedua, masih banyaknya jalanan yang kurang baik yang mengakibatkan pengguna jalan maupun wisatawan merasa kurang nyaman melewati akses tersebut. Ini harusnya menjadi pertimbangan dan perhatian awal ketika Desa Nepo hendak dijadikan sebagai wisata syariah meskipun dalam hal yang tadi disebutkan memiliki peluang tetapi masih perlu pembenahan sehingga tidak ada kaata tidak layak dijadikan wisata syariah.”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas Desa Nepo memiliki peluang dari aspek aksesibilitas tetapi perlu pembenahan dan perbaikan terlebih dahulu. Kurangnya

⁷⁸Ilham, BPD Desa Nepo, wawancara penulis di Dusun Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

pengetahuan mendalam kepada masyarakat mengenai desa wisata juga merupakan kendala utama tidak terciptanya sapa pesona seperti yang seharusnya diterapkan dalam desa wisata.

Adapun indikator Menurut Sunaryo, untuk aksesibilitas Kemudahan mencapai mencapai ini seperti penetapan jalur dan tanda petunjuk untuk kemudahan wisatawan mencapai daya tarik wisata yang dituju. Kenyamanan perjalanan untuk mencapai daya tarik wisata sangat diperlukan sekali. Keamanan merupakan hal yang paling utama dibutuhkan wisatawan. Kelancaran yang dimaksud yaitu kelancaran dalam segi angkutan transportasi maupun perjalanan.⁷⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada pengelola Desa Wisata dengan nama Bahrul Ulum :

“Untuk akses jalan sudah kami usulkan kepada pemerintah khususnya agar lebih ditindak lanjuti secepatnya dikarenakan akses jalan di Desa Nepo tidak terlalu bagus maka dari itu perlu di perbaiki terlebih dahulu.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa akses jalannya yang kurang bagus di Desa Nepo menjadikan hal utama yang harus di lakukan perbaikan terlebih dahulu.

Konsep dari wisata syariah ditinjau dari aspek aksesibilitas memiliki peluang tetapi perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Agar wisatawan yang datang juga memiliki kenyamanan serta kepuasan tersendiri. Pembinaan dan sosialisasi ke masyarakat mengenai wisata syariah sehingga nantinya lebih memperhatikan lingkungan khususnya.

⁷⁹Sita Sari Ningsihh, *Pengaruh Amenitas, Atraksi Wisata, dan Aksesibilitas Terhadap Loyalitas Wisatawan ke Destinasi Wisata Tangkahan Kabupaten Langkat Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Intervening* (Medan, 2020), h. 22

⁸⁰Bahrul Ulum, Pengelola Wisata Desa Nepo, wawancara penulis di Dusun Lanrae, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, 10 Januari 2023

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Nepo, analisis data dan pengecekan keabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peluang Desa Nepo sebagai desa wisata syariah ditinjau dari aspek atraksi. Destinasi Wisata Syariah sendiri memiliki konsep wisata alam yang dipadukan dengan wisata religi, dengan lingkungan yang luas sehingga pengunjung dapat membuat kegiatan-kegiatan besar di Desa ini. Desa Nepo belum di kenal sebagai wisata syariah atau wisata dengan konsep islami. Tetapi memiliki peluang dijadikan sebagai wisata syariah dari aspek atraksi dengan melakukan pengembangan berupa pembangunan museum masjid Habibie dari Habibie Center serta melihat dari sejarah-sejarah wisata religi di Desa Nepo. Di desa ini juga nantinya akan dikembangkan atraksi-atraksi yyang dapat membuat Desa Nepo semakin dikenal nantinya di public yang konsepnya tdak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Peluang Desa Nepo sebagai desa wisata syariah ditinjau dari aspek akomodasi yang tentu memiliki peluang dalam hal *Home Stay* yang disediakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wisatawan yang berkunjung. Kehidupan masyarakat sehari-hari akan menjadi bagian yang sangat menarik untuk diikutsertakan sebagai daya tarik wisata. Tidak hanya itu, pembangunan berkelanjutan juga sementara dirancang oleh pengelola dan pemerintah khususnya untuk pengembangan Desa Nepo.
3. Peluang Desa Nepo sebagai desa wisata syariah ditinjau dari aspek aksesibilitas memiliki peluang tetapi perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Agar wisatawan yang datang juga memiliki kenyamanan serta kepuasan dalam

berwisata. Akses jangkauan jalanan yang kurang baik merupakan hal utama dan mendasar ketika wisatawan ingin berkunjung, dengan perbaikan jalanan yang sementara di renovasi oleh pihak pemerintah Desa Nepo akan lebih menjadikan desa wisata ini lebih mudah dijangkau oleh wisatawan.



B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan :

1. Untuk Pemerintah Desa, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Nepo terkait dengan Desa Wisata yang kemudian nantinya merujuk pada Desa Wisata Syariah, ketika ditinjau dari kenyataan yang ada bahwa tidak semua masyarakat sadar akan desa wisata sehingga pemanfaatan sumber daya manusia kurang dan pengetahuan tentang bagaimana cara mendapatkan keuntungan dari sektor pariwisata untuk meningkatkan ekonomi sehingga masyarakat bisa melihat dampak positif dari desa wisata kepada kehidupan masyarakat..
2. Untuk masyarakat, melakukan pembenahan dalam hal kebersihan, ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa sebagai fasilitator sehingga mendorong masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarang tempat, juga tidak ada lagi masyarakat yang membiarkan hewan ternak peliharaanya berkeliaran yang nantinya akan mengurangi keindahan dari desa wisata itu sendiri.
3. Untuk pengelola, memperkuat promosi di media sosial sehingga semakin banyak wisatawan yang datang setiap minggunya. Dengan luasnya jangkauan akan semakin banyak wisatawan yang penasaran, dengan melakukan peningkatan pada sistem promosi maka akan berdampak baik pada peningkatan pengunjung.
4. Untuk pembaca diharapkan kedepannya lebih memperbanyak lagi referensi atau buku-buku bacaan mengenai pariwisata syariah, penelitian ini merasa hal sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan untuk para mahasiswa berkaitan dengan peluang Desa Nepo Menjadi Wisata Syariah
5. Untuk peneliti, berharap agar Desa Nepo bisa dijadikan sebagai destinasi wisata syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Ansar, “ *Tradition Of Manre Sipulung For Watangepo Society In Nepo Village, Barry Regency* (Balai Pelestarian Budaya Sulawesi Selatan, 2016).

Arikunto, Suharismi, *Dasar-dasar Research* (Bandung, Tarsito, 1995).

Damin, Sudarman, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).

Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang *Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Pariwisata Prinsip Syariah*.

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

Komariah, Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet VII; Bandung: Alfabeta, 2017).

MasterCard dan Crescenrating. *Global Muslim Tourism Index 2015*, (29 Mei 2022).

Mylonopoulos, P., Moira, ‘The Management Of Tourist’s Alimentary Needs by the Tourism Industry’, (*International Journal of Culture and Tourism Research*, 2012).

Satriana, ED, Faridah HD, *Jurnal Of Halal Product and Research* (JHPR, 2018).

Satori, Djama’an dan Komariah Aan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

Sucipto Hery, Andayani Fitria, ‘*Potensi dan Prospek Wisata Syariah dan Tantangannya*’, (Yogyakarta :2007).

Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Parepare, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*

Unggul Priyadi, Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan, (Yogyakarta: Unit Penerbit 2016 dan Percetakan, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisataan World Economy Forum In Gevena-Switzerland, Travel & Tourism Competitivences Report* (2009).

SKRIPSI DAN JURNAL

Arifin, Johar, “Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah Tentang Pariwisata” (*Jurnal, An-Nur*, Vol 4 No 2, 2015).

Bawazir, Tohir , “*Panduan Praktis Wisata Syariah*”, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Chanin, S, Chookaew, , ‘Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in’, (*Journal of Economics, Bussiness and Management*, III, 2015).

Dwi, Putra Buana Sakti, Baiq Nadia Nirwana, Rionaldi Gigih Imam Pratama, Yulia Prayanti, Pendidikan Kewirausahaan, Opportunity Recognition, Minat Berwirausaha (*Tesis Manajemen Universitas Mataram*, 2020).

Ernie, Yuliat, Djoko Suwandono, Arahan Konsep dan Strategi Pengembangan Kawasan Desa Wisata Nongkosawit Sebagai Destinasi Wisata Kota Semarang (*Skripsi Universitas Diponegoro*, 2016).

Helauddin & Wijaya Hengki, “Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif,” (*Jurnal Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar*, 2019).

Hermawan, Hary, “Pengembangan Destinasi Wisata Pada Tingkat Tapak Lahan Dengan Pendekatan Analisis Swot” (*Jurnal* 2017).

Lewar, Ero Sarawati, Strategi Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Lasusua Kolaka Utara Sebagai Wisata Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUI, (*Skripsi Sarjana*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Yuwana, Satria Millian, “Analisis Permintaan Kunjungan Objek Wisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara” (*Skripsi: Universitas Diponegoro*. 2010).

Rizky, Atika Salsabila Ivabianca Putri, Elizabeth Puspaningrum Sinyor, Annush, Chandrika Putri, Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Analisis SWOT Desa Sidomekar Dan Penggunaan Aplikasi Tour Guide Online Kabupaten Jember (*Skripsi Universitas Jember*, 2018).

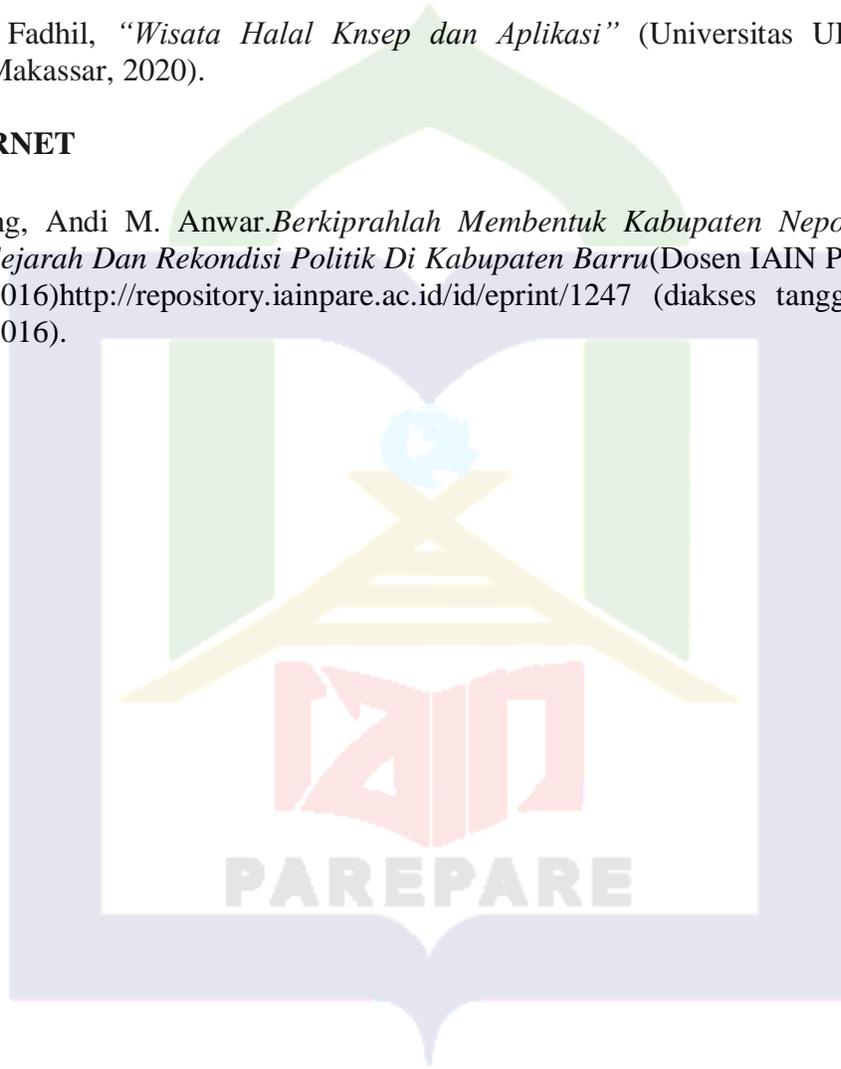
Lewar, Ero Sarawati, “*Strategi Pengembangan Wisata Pantai Pasir Putih Lasusua Kolaka Utara Sebagai Wisata Syariah Tinjauan Fatwa DSN-MUP*” (Skripsi Sarjana; Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Saputri, Eqa Inten, *Analisis Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Studi Objek Wisata Pantai Seruni Bantaeng* (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

Surur, Fadhil, “*Wisata Halal Kncsep dan Aplikasi*” (Universitas UIN Alauddin Makassar, 2020).

INTERNET

Zaenong, Andi M. Anwar. *Berkiprahlah Membentuk Kabupaten Nepo Beralaskan Sejarah Dan Rekondisi Politik Di Kabupaten Barru* (Dosen IAIN PARE-PARE, 2016) <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/1247> (diakses tanggal 20 April 2016).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. Pedoman Wawancara

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
<p align="center">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

NAMA MAHASISWA : UMI KALSUM H
 NIM : 19.93202.040
 PRODI : PARIWISATA SYARIAH
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 JUDUL : MENAKAR PELUANG DESA NEPO KABUPATEN

BARRU SEBAGAI DESTINASI WISATA SYARIAH

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang menakar peluang Desa Depo Kabupaten Barru sebagai destinasi wisata syariah, Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian dianalisis untuk memperoleh informasi penelitian. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut :

Wawancara Untuk Pemerintah Desa Nepo dan Pengelola Destinasi Wisata di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Daftar Pertanyaan

1. Apa yang melatarbelakangi terpilihnya Desa Nepo Sebagai Desa Wisata?
2. Siapa yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan Destinasi wisata di Desa Nepo?
3. Sejauh mana peran pemerintah Desa dalam pengembangan Desa Wisata di Desa Nepo sampai saat ini?
4. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan Desa Wisata Di Nepo?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila Desa Nepo dijadikan sebagai Destinasi Wisata Syariah?
6. Apakah ada peluang Desa Nepo menjadi Desa Wisata Syariah?
7. Jika ada, peluang apa saja yang bisa menjadikan Desa Nepo sebagai Desa Wisata Syariah?
8. Apakah sudah ada fasilitas seperti atraksi, lokasi, akomodasi dan aksesibilitas yang disediakan?

Wawancara Untuk masyarakat Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana peran masyarakat Desa Nepo dalam pembangunan Desa Wisata di Desa nepo?
2. Apakah masyarakat Desa Nepo turut terlibat atau tidak dalam pengelolaan Desa Wisata Nepo?
3. Bagaimana antusias masyarakat lokal terkait Desa Wisata Nepo ketika pertama kali dibentuk??
4. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Desa Nepo dalam pengelolaan Desa Wisata di Nepo?
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila Desa Nepo dijadikan sebagai Destinasi Wisata Syariah?
6. Apakah ada peluang Desa Nepo menjadi Desa Wisata Syariah?
7. Jika ada, peluang apa saja yang bisa menjadikan Desa Nepo sebagai Desa Wisata Syariah?
8. Apakah sudah ada fasilitas seperti atraksi, lokasi, akomodasi dan aksesibilitas yang disediakan?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk di gunakan dalam perhatian yang bersangkutan.

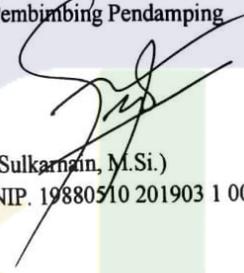
Pare-pare, 1 Januari 2023

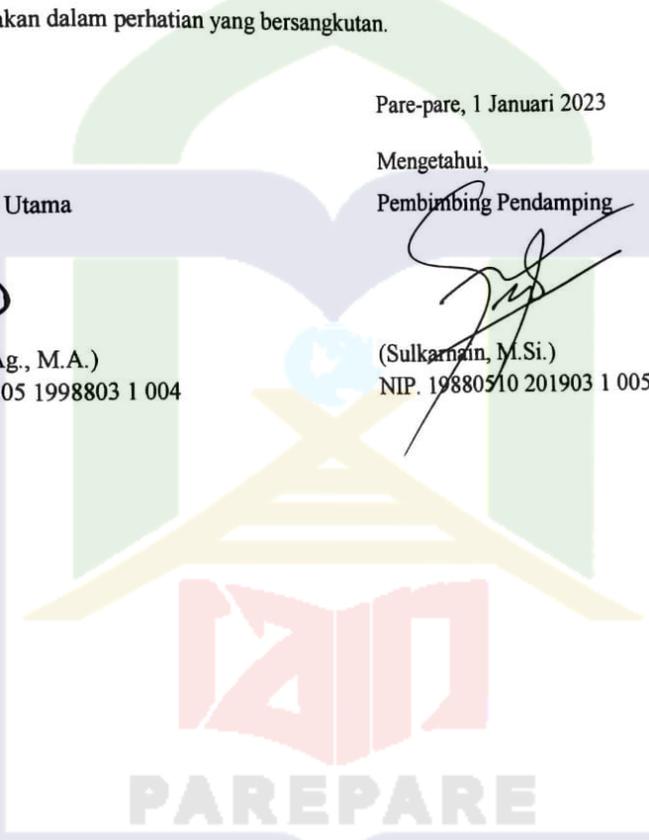
Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Bahriar, S.Ag., M.A.)
NIP. 19720505 1998803 1 004


(Sulkarnain, M.Si.)
NIP. 19880510 201903 1 005


PAREPARE

TRANSKRIP WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi terpilihnya Desa Nepo Sebagai Desa Wisata?

Jawaban :

- a) Desa Nepo merupakan salah satu dari 5 Desa Wisata di Kabupaten Barru kemudian tercatat peringkat 500 desa di Sulawesi Selatan sebagai Desa Wisata. Latar belakang terpilihnya Desa Nepo sebagai desa wisata tidak luput dari peran Presiden ke-3, B.J Habibie yang dijuluki kampung Habibie.
- b) Memang ada beberapa objek wisata yang patut dikelola sehingga bisa menjadikan Desa Nepo sebagai penilaian, ada beberapa objek wisata adalah *bujung mattimboe, goa bolabatue, danau pakue* yang terletak di atas bukit, tetapi masih ada objek wisata yang belum kami kelola.
- c) Yang pertama menarik dari sisi spot wisata maupun dari sisi sejarah Desa Nepo, ditambah dengan adanya tempat mandi Pak Habibie, air terjun, *mattimboe, bola batue* dan masih banyak lagi spot lain.

2. Siapa yang menjadi penanggung jawab dalam pengelolaan destinasi wisata di desa Nepo?

Jawaban :

- a) Pemerintah desa memberikan tanggung jawab kepada pokdarwis untuk mengelola destinasi wisata yang ada di Desa Nepo. Dimana pokdarwis dibagi menjadi 2 yaitu di Dusun Watang Nepo dan Dusun Mareppang.
- b) Pokdarwis, salah satu anggota BPD

3. Apa yang menjadi kendala dalam pengelolaan dan pengembangan Desa wisata di Nepo?

Jawaban :

- a) Kendala utama yaitu akses jalan yang kurang baik dan putusnya jembatan penghubung antara dusun menjadikan masyarakat harus melewati desa lain untuk dapat sampai ke Watan Nepo.

- b) Adanya tambang di Desa Nepo menjadi kendala karena merusak jalanan serta lingkungan yang tidak bersih jadi perlu diakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat mengenai kebersihan.
 - c) Kendala yang dialami teman-teman dalam mengelola pariwisata yaitu dari sisi bisnis wisata dimana budaya masyarakat serta pengguna jasa wisata belum terlalu faham dan tidak sadar memberikan kontribusinya termasuk membayar kontribusi bagi para pengunjung, kendala selanjutnya yaitu pemerintah kabupaten maupun desa belum bersinergi untuk memberikan sentuhan untuk pengembangan potensi wisata berkelanjutan .
4. Sejauh mana peran pemerintah Desa dalam pengembangan desa wisata di Desa Nepo sampai saat ini?

Jawaban :

- a) Pemerintah desa perlahan memberi sentuhan kepada spot wisata yang dijadikan spot andalan bagi beberapa pengunjung misalnya ada *Bujung Mattimboe, sungai Mareppang, Danau Pakue*. Pemerintah Desa maupun kabupaten untuk memajukan wisata itu sendiri
5. Bagaimana tanggapan bapak/ibu apabila Desa Nepo dijadikan sebagai desa wisata syariah?

Jawaban :

- a) Sangat bagus dan saya sangat mendukung jika Desa Nepo dijadikan wisata syariah, kemudian sudah ada visi misi dari Kabupaten ke Desa yaitu berdasarkan keagamaan.
- b) Suatu kebanggaan kepada kami ketika Desa Nepo dikembangkan sebagai Destinasi Wisata Syariah apalagi yang berlandaskan islam apalagi dari segi kuliner.
- c) Sebanarnya cukup bagus tetapi wisata syariah perlu spot tertentu dan memiliki pasar tersendiri sehingga apabila mau dijadikan sebagai wisata syariah memiliki batasan tersendiri dalam hal syariah.

- d) Dengan adanya desa Wisata kedepannya saya kira akan minim remaja yang datang membawa pasangan dan berdua-duan di tempat wisata tersebut.

6. Apakah ada peluang Desa Nepo dijadikan sebagai Desa Wisata Syariah?

Jawaban :

- a) Saya kira ada, karena remaja masjid, tokoh agama serta masyarakat sangat aktif jika ada acara keagamaan.
- b) Ya, sangat memiliki peluang.

7. Apa peluang Desa Nepo dari aspek atraksi, akomodasi dan aksesibilitas?

Jawaban :

- a) Dari aspek atraksi belum terlalu menonjol cuaman wisatawan mancanegara lebih fokus melihat masjid Nur Habibie. aksesibilitas ini merupakan kendala utama kita di Desa Nepo dikarenakan jalanan utama yang selalu kita lalui kurang baik sehingga ini menjadi perhatian utama kita selaku pemerintah desa untuk melakukan perbaikan jalan, kemudian kendala kedua putusnya jembatan penghubung menuju destinasi wisata Dusun Lanrae dan Watan Nepo. Fasilitas yang kami buat dalam bidang akomodasi di sini dalam bentuk *home stay*, kami sudah merancang dan sekarang sementara proses pembangunan *home stay*. Kemudian hotel dan penginapan ini merupakan perencanaan jangka panjang yang sudah dibahas tetapi belum di masukan ke dalam RKPD Des
- b) Memang ada beberapa objek wisata yang menjanjikan dan patut dikelola menjadi Desa wisata yang ada di desa nepo diantaranya Bujung Mattimboe, Goa Bola Batue, Danau Pakue yang terletak diatas bukit, Masjid Nur Habibie, Bendungan, Wae Tuoe biasa disebut Bujung Pulawenggi dan masih ada beberapa spot wisata yang belum sempat kami kelola dan rencananya akan dikelola sebagai mana mestinya.
- c) Dalam hal akomodasi kami akan membuat *home stay boladare* dimana nanti beradaptasi dengan alam dan melihat nuansa Desa Nepo khususnya masyarakat secara langsung.

- d) Atraksi Kami adakan paket wisata ketika ingin berkunjung di Desa Wisata, akomodasi rumah nanti akan dijadikan *Home stay*, aksesibilitas ini masih kurang dan nanti kami sebagai pengelola akan lebih memfokuskan membangun akses yang memiliki jalur yang lebih dan udah di jangkau di semua kalangan.
- e) Kalo peluang, jelas memiliki peluang akan tetapi harus bertahap, karena adab dan perilaku masyarakat secara keseluruhan belum terlalu menonjol ke syariah.

1. Apakah masyarakat terlibat dalam pengelolaan desa wisata Nepo?

Jawaban :

- a) Ya, masyarakat terlibat dalam hal tukang parkir, bersih-bersih serta pengelolaan lain.
- b) Masyarakat sangat antusias meskipun tidak semua sadar hal positif tentang desa wisata.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

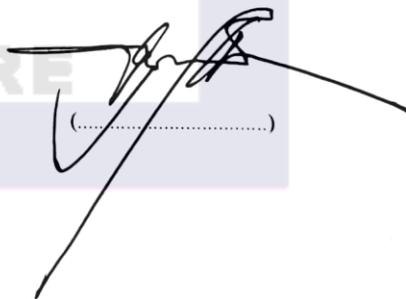
Nama : MAMMA HUSARI
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : KEPALA DESA NEPO
No. Hp : 081 243 361 117

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudari **Umi Kalsum H** yang sedang melakukan penelitian terkait dengan "Menakar Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah"

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Nepo, Januari 2023

Yang Diwawancarai



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DARMAN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : PENGELOLA WISATA
No. Hp : 081 344 839 817

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudara **Umi Kalsum H** yang sedang melakukan penelitian terkait dengan “Menakar Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah”

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Nepo, Januari 2023

Yang Diwawancarai

(DARMAN)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : MASYARAKAT DESA NEPO
No. Hp : 082 253 928 691

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudara **Umi Kalsum H** yang sedang melakukan penelitian terkait dengan “Menakar Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah”

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Nepo, Januari 2023

Yang Diwawancarai

(.....
ILHAM
.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Muhammad Taha*
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*
Pekerjaan : *Pengelola wisata Desa nepo*
No. Hp : *08221122505*

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudara **Umi Kalsum H** yang sedang melakukan penelitian terkait dengan "Menakar Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah"

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Nepo, Januari 2023

Yang Diwawancarai


(*Muhammad Taha*)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BAHEUL UUM**
Jenis Kelamin : **LAKI - LAKI**
Pekerjaan : **BPD DESA NEPO**
No. Hp : **0852 - 5913 - 3031**

Menerangkan bahwa benar, telah memberi keterangan wawancara kepada saudara **Umi Kalsum H** yang sedang melakukan penelitian terkait dengan "Menakar Peluang Desa Nepo Sebagai Destinasi Wisata Syariah"

Demikian surat keterangan wawancara dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Desa Nepo, 9 Januari 2023

Yang Diwawancarai


(.....)
Baheul Uum

SURAT IZIN MENELITI



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp (0427) 21662, Fax (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> . e-mail : barrudpmpstpk@gmail.com Kode Pos 90711

Barru, 27 Desember 2022

Nomor : 602/IP/DPMTSP/XII/2022
 Lampiran :
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada
 Yth Kepala Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab.
 Barru
 di-
 Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare Nomor B.5863/In.39.8/PP.00.9/12/2022 tanggal 09 Desember 2022 perihal tersebut di atas, maka Mahasiswa (i) / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

Nama : UMI KALSUM. H
Nomor Pokok : 19.93202.040
Program Studi : Pariwisata Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-Pare
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Pattanrongge Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **01 Januari 2023 s/d 01 Februari 2023**, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

MENAKAR PELUANG DESA NEPO KABUPATEN BARRU SEBAGAI DESTINASI WISATA SYARIAH

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara (i) untuk memberikan bantuan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas,
 Kabin. Pengenggaraan Pelayanan
 Perizinan
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU
FATMAWATI LEBU, SE
 Pangkat: Pembina, IV/a
 NIP. 19720910 199803 2 008

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati (sebagai laporan);
2. Kepala Bappelitbanda Kab. Barru;
3. Camat Mallusetasi Kab. Barru;
4. Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare;
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Peninggal.

SURAT IZIN MENELITI DARI KAMPUS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.5863/In.39.8/PP.00.9/12/2022
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI BARRU
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 KABUPATEN BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : UMI KALSUM H
 Tempat/ Tgl. Lahir : Lanrae, 16 Juni 2001
 NIM : 19.93202.040
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PARIWISATA SYARIAH
 Semester : VII (TUJUH)
 Alamat : PATTANRONGNGE, KELURAHAN NEPO, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN BARRU dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

MENAKAR PELUANG DESA NEPO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU SEBAGAI DESTINASI WISATA SYARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 9 Desember 2022
 Dekan,



Muztalifah Muhammaduny

SURAT TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN MALLUSETASI
DESA NEPO**

Kode Pos. 90753

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 400.10.2.2/27 /DN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD TOAHA
Jabatan : Kepala Desa Nepo
Alamat : Wt. Nepo Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : UMI KALSUM, H
Nim : 19.93202.040
Nama Universitas : INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Judul : MENAKAR PELUANG DESA NEPO KABUPATEN BARRU
SEBAGAI DESTINASI WISATA SYARIAH.

Bahwa nama tersebut di atas telah melakukan penelitian di Desa Nepo pada tanggal 01 Januari 2023 s/d 30 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nepo, 30 Januari 2023
Kepala Desa Nepo


MUHAMMAD TOAHA

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA NEPO



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PENGELOLA WISATA



DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PENGELOLA WISATA



PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN BPD DESA NEPO



PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA NEPO



BUMDESDESA NEPO

2). Potensi

No.	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
Unit usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta			
1	Masyarakat rutin melakukan kegiatan pesta baik pesta perkawinan maupun pesta adat lainnya yang membutuhkan peralatan seperti tenda dan lain-lain.	BUMDes mampu melayani kebutuhan Masyarakat	Memasang harga yang sepiantasnya, khususnya bagi Masyarakat Mallusetasi
Unit Usaha Permandian Alam			
	Desa nepo memiliki banyak objek wisata yang berupa permandian alam yang menarik seperti sungai, danau dll.	Memanfaatkan permandian alam sebagai objek wisata yang ada di desa nepo sebagai tempat wisata	Membangun pasilitas-pasilitas wisata di tempat-tempat yang dapat dijadikan sebagai tempat wisata dan melakukan periklanan

4

BUM DESA PEMBAHARUAN NEPO | Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

3). Peluang

No.	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
Unit usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta			
1	Masyarakat sering menggunakan serta membutuhkan alat pesta seperti tenda dalam acara pesta pernikahan maupun pesta adat lainnya	BUMDes dapat menyediakannya	Penyediaan dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat
Unit usaha permandian alam			
1	Adanya asset desa berupa permadian alam (bujung mattimboe) yang sudah dikenal luas sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi	Menjadikan bujung mattimboe sebagai objek wisata yang menarik	Melakukan pembenahan serta pembangunan pasilitas pada objek wisata dan melakukan periklanan melalui media social

4). Prospek Usaha

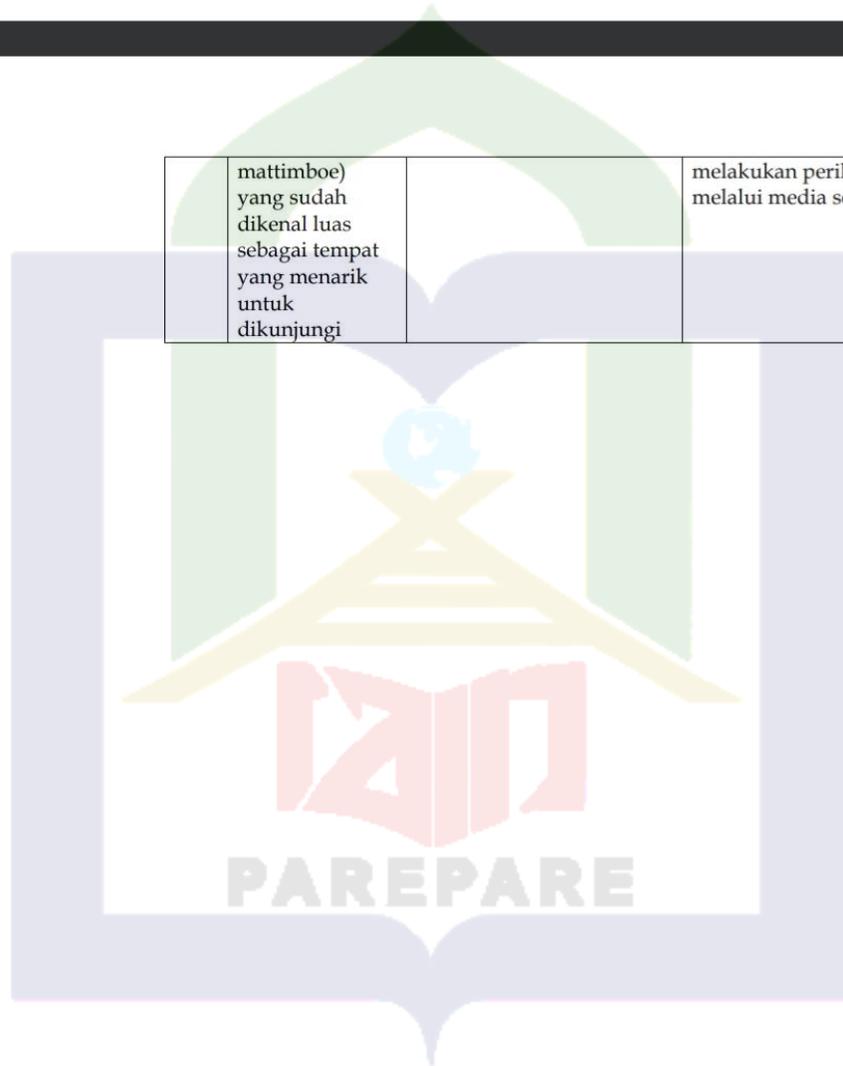
No.	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha
Unit Usaha Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta			
	BUMDes menjadi perantara dan penyedia	BUMDes menjadi penyedia Tenda bagi Masyarakat	Memberikan harga yang sesuai dengan pelayanan yang terbaik
	BUMDes mampu memenuhi kebutuhan Tenda Masyarakat	Masyarakat akan merasa puas atas pelayanan BUMDes, karen disamping harga terjangkau oleh Masyarakat, juga pemenuhannya cepat karena jaraknya yang sangat dekat	Meningkatkan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Mallusetasi
Unit Usaha Permandian Alam			
	Adanya asset desa berupa permadian alam (bujung	Menjadikan bujung mattimboe sebagai objek wisata yang menarik	Melakukan pembenahan serta pembangunan pasilitas pada objek wisata dan

Unit Usaha Permandian Alam			
	Adanya asset desa berupa permadian alam (bujung	Menjadikan bujung mattimboe sebagai objek wisata yang menarik	Melakukan pembenahan serta pembangunan pasilitas pada objek wisata dan

5

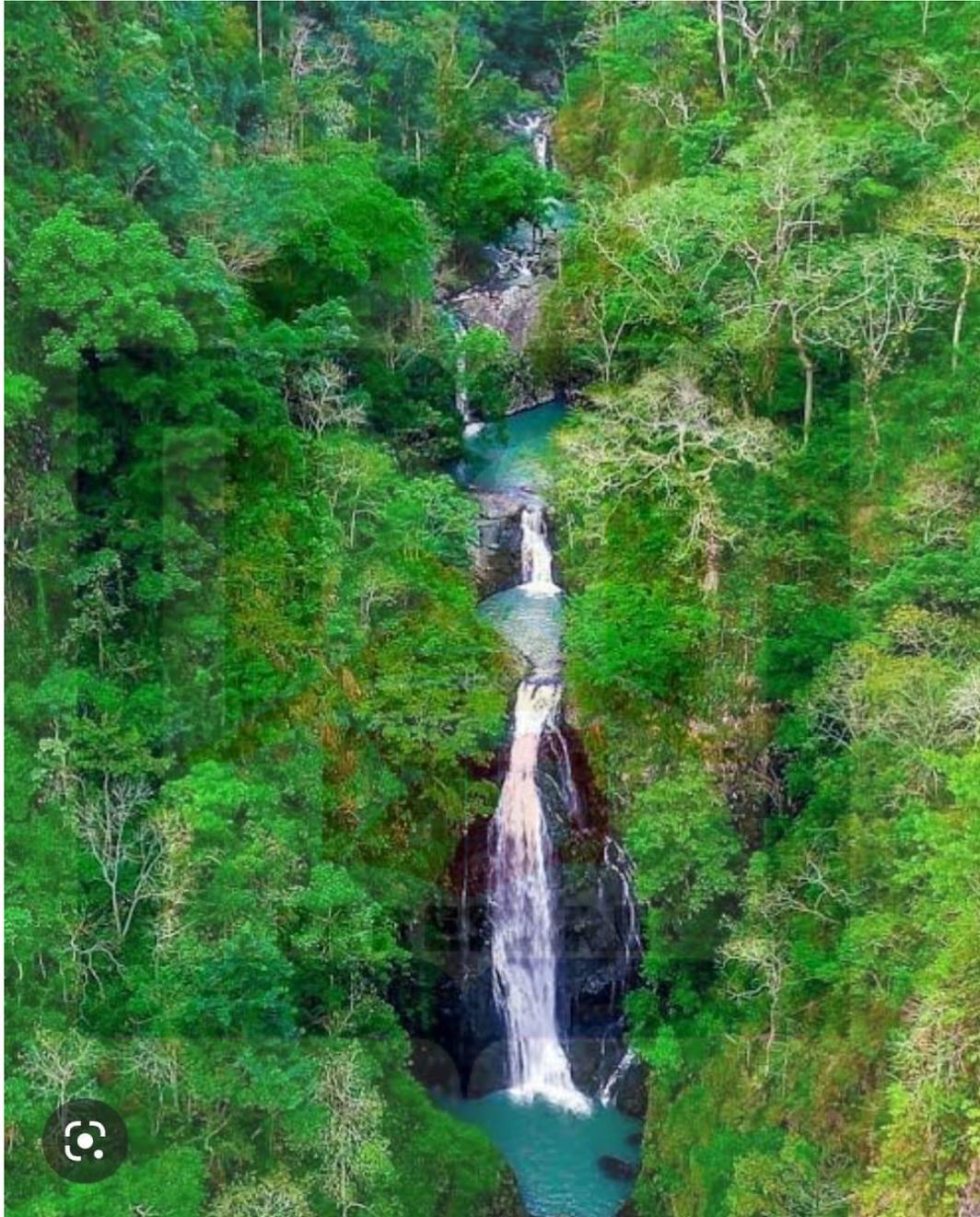
BUM DESA PEMBAHARUAN NEPO | Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab. Barru

	mattimboe) yang sudah dikenal luas sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi		melakukan periklanan melalui media social
--	---	--	---



BEBERAPA DOKUMENTASI DESTINASI WISATA DESA NEPO

Air Terjun Bersusun





Bendungan Lanrae (Tempat Memandikan Kuda BJ.Habibie)



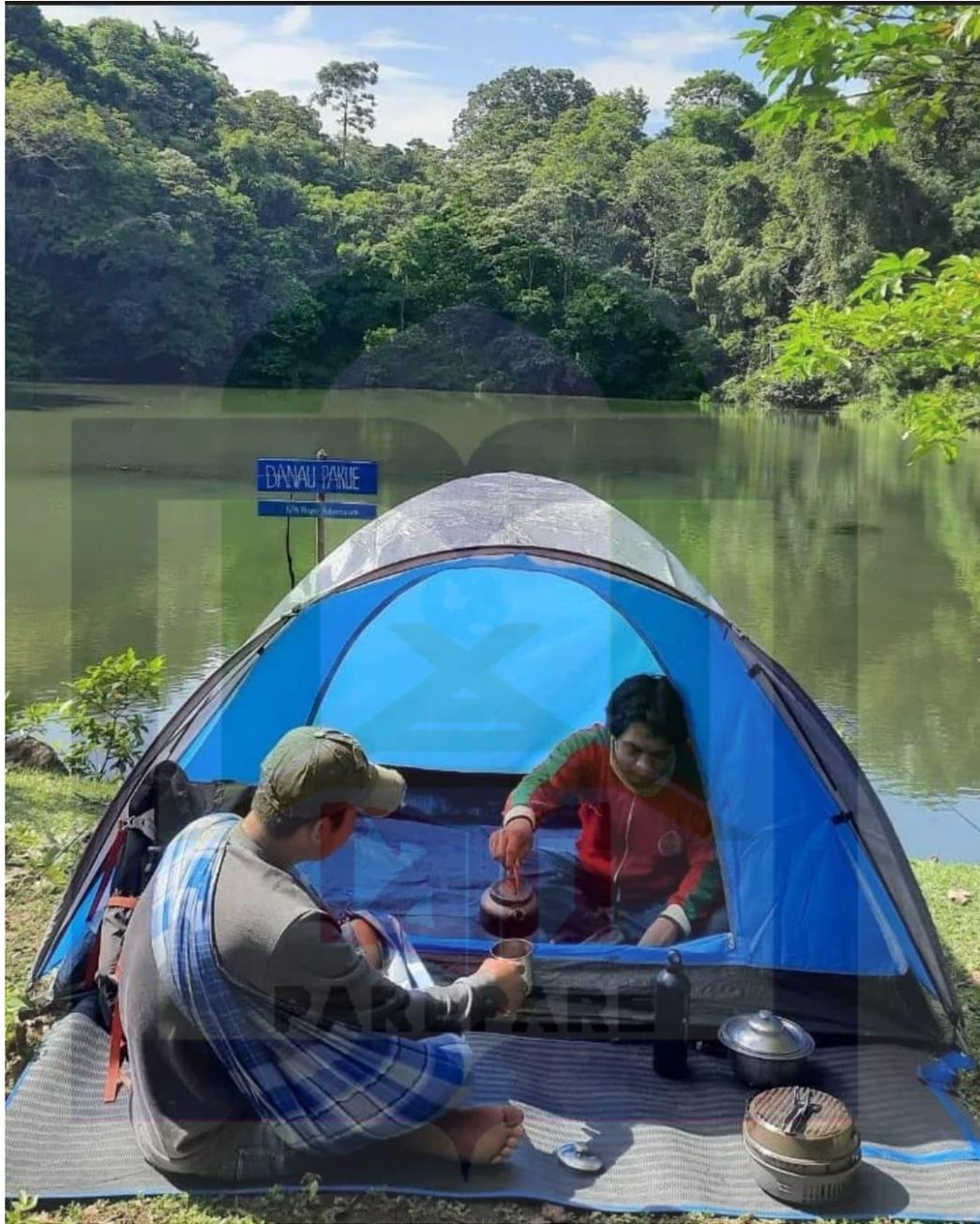
Masjid Peninggalan BJ.Habibie



Bujung Mattimboe



Danau Pakue Desa Nepo



Peletakan Batu Pertama Museum BJ.Habibie



RKPDES DESA NEPO

LEMBAR KONTROL KEGIATAN ADD TAHUN ANGGARAN 2023

NO	BIDANG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1		Penghasilan Tetap Kepala Desa	55.200.000
2		Penghasilan Tetap Perangkat Desa	468.960.000
3		Jaminan Sosial Kepala Desa	14.181.696
4		Operasional Pemerintah Desa	206.076.000
5		Tunjangan BPD	100.800.000
6		Tersedianya Operasional BPD	7.744.800
7		Terbayarnya Insentif/Operasional RT/RW	61.200.000
8		Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	108.000.000
9		Jaminan Sosial Bagi Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	1.166.400
10		Jaminan Sosial Bagi BPD	907.200
11		Jaminan Sosial Lembaga Desa Lainnya	2.203.200
12		Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	66.000.000
13		Pelatihan Kearsipan	5.488.000
14		Musdes RPJMDes	17.430.000
15		Musdes RPJMDes	2.742.000
16		Musrenbang RPJMDes	3.510.000
17		Musyawah Pembahasan dan Penetapan RPJMDes	1.330.000
18	1	Musrenbang Anak	2.570.000
19		Rebug Stunting	1.330.000
20		Musdes RKPDesa	2.630.000
21		Pra Musrenbang RKPDes	1.570.000
22		Musrenbang RKPDes	3.510.000
23		Musyawah Pembahasan dan Penetapan RKPDes	1.330.000
24		Musyawah Pembahasan APBDes	325.000
25		Musyawah Pembahasan APBDes Perubahan	325.000
26		Musyawah Pembahasan Realisasi APBDes	325.000
27		Musyawah Turun Sawah (Mappalli)	6.810.000
28		Musyawah Penyusunan Program Pertanian	2.570.000
29		Musyawah Desa Lainnya	7.304.000
30		RPJMDesa	12.150.000
31		RKPDesa	11.850.000
32		Bimtek Tim Penyusun RPJMDesa	5.600.000
33		Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.187.500
34		Rapat Internal Pemerintahan Desa	2.820.000
35		Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	6.000.000
36	2	Perpipaan Dusun Pakka	246.364.804
37		Pembinaan TP PKK Desa Nepo	15.427.000
38	3	Jambore PKK	12.890.000
39		Gerak Jalan PKK	7.040.000
40	4	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	42.759.000
JUMLAH			1.526.626.600
Anggaran ADD Tahun 2023			1.526.626.600
selisih			-

LEMBAR KONTROL KEGIATAN DDS TAHUN ANGGARAN 2023

NO	BIDANG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	1	Operasional Pemdes 3%	32.562.150
2		SDGS Desa	6.416.800
3		Pemutahiran Indeks Desa Membangun (IDM)	707.200
4	2	Pembangunan PAUD Al Qalam Dusun Wt. Nepo	424.271.900
5		Insentif Kader KPM	3.600.000
6		Insentif Kader Posyandu	50.400.000
7		Makanan Tambahan	12.600.000
8		Operasional Posyandu	2.093.000
9		Pengadaan Posyandu Kit/Mobiler Posyandu	6.300.000
10		Penyuluhan Kelas Ibu Hamil	6.770.000
11		Penyuluhan Kelas Balita	14.730.000
12		Bimbingan Teknis Kader Kesehatan	3.955.000
14	3	Papan Transparansi APBDes	1.417.500
15		Pembentukan Kelompok Tagana	18.490.200
16	4	Pelatihan Budidayah Ikan Air Tawar	37.862.000
17		Pelatihan Peternakan Terpadu	179.257.000
18		Pelatihan Pembuatan Gula Semut/Palm Sugar	12.621.000
19	5	Bantuan Langsung Tunai	271.351.250
JUMLAH			1.085.405.000
Anggaran DDS tahun 2023			1.085.405.000
Selisih			-



LEMBAR KONTROL KEGIATAN PBH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	BIDANG	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	1	Daun Hijau	15.000.000
2	3	Pembentukan Sanggar Seni	12.512.000
3		Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat	3.312.000
4		Kegiatan Ncpo Festival Ramadhan	4.928.000
5		Semarak 17 Agustus	6.186.000
6		Even Olahraga, Seni Tahunan Desa Ncpo	14.637.500
7		Kegiatan Gotong Royong Desa	7.291.787
8		Gerak Jalan Karang Taruna	7.506.400
9		4	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
JUMLAH			78.175.687
Anggaran BHP tahun 2023			78.175.687
Seluruh			-



BIODATA PENULIS



UMI KALSUM H, Lahir di Lanrae pada tanggal 16 Juni 2001 merupakan anak Empat dari Lima bersaudara dengan ayah Hasanuddin Sennong dan ibu Nagasia di Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal di SD Negeri Inpres lanrae pada tahun 2007-2013, dan melanjutkan di SMP Negeri 1 Mallusetasi pada tahun 2013-2016, Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Barru pada tahun 2016-2019.

Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare mengambil Program Studi Pariwisata Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Imigrasi Kelas II Pare Pare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.), penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas skripsi yang berjudul “Menakar Peluang Desa Nepo Kabupaten Barru Sebagai Destinasi Wisata Syariah”.

